



THE **VENTI** FOUNDATION



GOOD CORPORATE GOVERNANCE

UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN



OLEH :
HENDRIK MANOSSOH



PT. NORLIVE KHARISMA INDONESIA

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN**

Oleh :
Hendrik Manossoh

Diterbitkan Oleh:
PT. Norlive Kharisma Indonesia
2016

**GOOD CORPORATE GOVERNANCE
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Penulis:
HENDRIK MANOSSOH

ISBN:
978-602-73706-6-1

Editor:
Irma Wulansari

Penyunting:
Sigit Arga

Desain Sampul dan Tata Letak:
Tim Kreatif NKI

Diterbitkan Oleh:
PT. Norlive Kharisma Indonesia
Bekerjasama Dengan:
Venti Foundation

Redaksi:
PT. Norlive Kharisma Indonesia
Jl. Pasir Salam No. 46 Bandung Jawa Barat
Telp. 022-5227485
norlivekharisma@gmail.com

Distributor Tunggal:
Venti Foundation
Jl Tebet Utara Dalam 16A
Jakarta Selatan 12820
Telp. 021-22839315
Ventifoundation@gmail.com

Cetakan Pertama, April 2016
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Isi Tulisan Diluar Tanggungjawab Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena hanya berkat pertolongan dan tuntunanNya sajalah, Buku dengan Judul *Good Corporate Governance* untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dapat terselesaikan. Buku ini merupakan pendalaman akan berbagai teori dan konsep akuntansi, seperti *decision usefulness approach, infomation asymmetry, positive accounting theory, agency theory, dan earnings management*. Dalam Buku ini, disajikan pula berbagai bukti empiris yang berkaitan dengan teori-teori tersebut.

Buku ini diperuntukkan untuk para dosen dan mahasiswa yang mempelajari Mata Kuliah Teori Akuntansi. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai *good corporate governance* yang dikaitkan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan.

Akhir kata, tiada yang kekal, abadi dan sempurna di dunia ini, begitu pula dengan penulisan buku ini. Karena itu, demi penyempurnaan penulisan buku, dengan sangat penulis mengharapkan berbagai masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan memberkati dan menolong kita semua. Amin.

Manado, April 2016
Penulis,

Dr. Hendrik Manossoh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	14
2.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	14
2.2. Latar Belakang Munculnya <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.3. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	21
BAB III INFORMASI AKUNTANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN	28
BAB IV PENDEKATAN <i>DECISION USEFULNESS</i> DALAM PELAPORAN KEUANGAN	44
4.1. Pendekatan <i>Decision Usefulness</i>	44
4.2. <i>Single Person Decision Theory dalam Decision Usefulness Approach</i>	48
4.3. <i>Theory of Investment dalam Decision Usefulness approach</i>	50
4.4. <i>Decision Usefulness: Information Approach & Measurement Approach</i>	52
4.5. Kesimpulan atas Pendekatan <i>Decision Usefulness</i>	58
BAB V ASIMETRI INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN	61
BAB VI <i>EARNINGS MANAGEMENT</i>	70
6.1. Apa itu <i>Earnings Management</i> ?	71

6.2. Latar Belakang Timbulnya <i>Earnings Management</i>	73
6.2.1. Teori Akuntansi Positif.....	73
6.2.2. <i>Agency Theory</i>	77
6.3. Pola dan Motivasi dalam <i>Earnings Management</i>	82
6.4. Implikasi <i>Earnings Management</i>	87
6.5. Bukti Empiris mengenai <i>Earnings Management</i>	89
BAB VII <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	95
7.1. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dan Kualitas Laporan Keuangan	95
7.2. Bukti Empiris Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan melalui Penerapan Prinsip <i>Good Corporate</i> <i>Governance</i>	102
BAB VIII PENUTUP	113
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Prinsip Good Corporate Governance	23
Gambar 2. Accounting Information Qualities	36

BAB I

PENDAHULUAN

Isu *good corporate governance* merupakan salah satu istilah yang populer pada dekade ini. Tak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan pada posisi terhormat. Pertama, *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate governance* (Daniri dan Simatupang., 2009).

Perhatian terhadap *corporate governance* terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti, Enron, Worldcom, Tyco, London dan Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang *independent* oleh *corporate boards*.

Secara khusus di Asia, adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia

dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *good corporate governance* di negara-negara Asia (Arifin, 2005). Lemahnya praktik *good corporate governance* pada negara-negara di Asia ini disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut, antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager, dkk. 2003).

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua *stakeholder* (Sulistiyanto dan Wibisono, 2008). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*. Kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malpraktik keuangan akibat krisis tersebut merupakan dampak buruknya penerapan praktik *corporate governance*.

Good corporate governance akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis tersebut. Banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

menunjukkan rendahnya mutu praktik *good corporate governance* di Indonesia.

Misalnya pada tahun 2001 adanya dugaan *insider trading* atas saham PT Bank Central Asia (BCA) yang diduga hal ini berhubungan dengan adanya pihak manajemen yang mengetahui serta memanfaatkan momentum penjualan saham kepada investor strategis untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi informasi (Arifin, 2005).

Praktik perdagangan dengan menggunakan hak akses informasi oleh orang dalam (*inside information*) ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap salah satu prinsip *good corporate governance*, yaitu kewajaran (*fairness*).

Ataupun terungkapnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT. Kimia Farma yang *overstated*, yaitu adanya penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (karena laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132 miliar), sehingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip pengungkapan yang akurat (*accurate disclosure*) dan transparansi (*transparency*) yang akibatnya sangat merugikan para investor, karena laba yang *overstated* ini telah dijadikan dasar transaksi oleh para investor untuk berbisnis (Arifin, 2005).

Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya sistem *good corporate governance* yang mengakibatkan kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi buruk.

Dalam rangka penerapan *good corporate governance*, Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan

kepentingan antara pemegang saham dan manajer, yaitu (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return* maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Sedangkan mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar.

Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan Seward, 1990; Jensen, 1993). Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1980). Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain

akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja manajer untuk mengetahui sejauh mana manajer telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik.

Selain itu pemilik dapat memberikan kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimmerman, 1986).

Dalam mengkomunikasikan informasi internal kepada pihak luar, perusahaan mengeluarkan laporan keuangan tahunan. Seperti dinyatakan dalam kerangka konseptual *Financial Accounting Standards Board (FASB)* bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis. Laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor

dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka.

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang penting. Menurut PSAK no 1, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (IAI, 2015).

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan, sehingga laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik agar dapat berfungsi dan bermanfaat bagi pemakai dan pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Perlu ditekankan lagi, laporan keuangan ini dibuat untuk mengkomunikasikan informasi internal perusahaan kepada pihak-pihak eksternal perusahaan yang menjadi pemangku kepentingan perusahaan. Untuk itulah harus dipahami bahwa

laporan keuangan perusahaan lebih dari sekedar angka karena mengandung informasi yang berguna bagi para penggunanya.

Pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan dan kebijakan akuntansi yang akan dipakai untuk melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan, sehingga laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, transparan, serta andal (Rezaee, 2004). Karena adanya tanggung jawab yang cukup besar tersebut, kualitas pelaporan akan banyak dipengaruhi oleh tujuan-tujuan dari pihak manajemen yang berkaitan dengan pencapaian perusahaan di masa datang (Iatridis, 2011).

Kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya tidak terlepas dari permasalahan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu reliabilitas dan relevansi. Informasi yang dapat dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan. Sebaliknya, informasi relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka pada masa lalu (IAI, 2015).

Pihak pemakai laporan keuangan terdiri atas dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal adalah manajemen perusahaan, sedangkan pihak eksternal adalah pihak-pihak yang menggunakan informasi

akuntansi di luar manajemen perusahaan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Selain pengguna internal dan eksternal informasi akuntansi, terdapat pihak auditor yang merupakan penjamin dari kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan perusahaan. Untuk dapat mencapai kualitas relevan dan reliabel maka laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor untuk memberikan jaminan kepada pemakai bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam konteks penerapan *good corporate governance*, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan haruslah menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen (Schipper dan Vincent, 2003).

Laporan ini diakui oleh investor, kreditor, supplier, organisasi buruh, bursa efek dan para analis keuangan sebagai sumber informasi penting mengenai keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan yang diharapkan berguna untuk pengambilan keputusan. Dan informasi ini juga diharapkan menjadi pedoman untuk pemegang saham dan investor potensial untuk menentukan kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten.

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan, baik eksternal maupun

internal yang kurang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan.

Akan tetapi, terdapat ketidak seimbangan dalam kepemilikan informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal, dimana ketidakseimbangan informasi ini terjadi karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak dapat memperoleh informasi yang sama (Scott, 2009).

Hal inilah yang disebut dengan asimetri informasi (*information asymmetry*). *Information asymmetry* disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat asimetri informasi yang tinggi, menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri (Arifin, 2005).

Arifin (2005) selanjutnya menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut, dalam praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidak transparanan yang dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku manajemen yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang adanya praktik *good corporate governance* pada perusahaan-perusahaan karena salah satu prinsip dasar dari *good corporate governance* adalah *Transparency* (keterbukaan).

Adanya asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar pengguna laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong manajemen bersikap oportunistis dengan memperbaiki profil laba akuntansi (Richardson, 1998; Chambers, 1999). Sikap oportunistis inilah yang dikenal dengan praktek *earnings management* (manajemen laba). Lebih jauh lagi, manajemen laba merupakan kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metoda akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik.

Healy dan Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan membentuk transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran laba kepada *stakeholders* tentang kinerja ekonomi yang mendasari perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Manajer cenderung lebih melakukan manajemen laba dengan mengendalikan transaksi akrual, yaitu transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas (Friedlan, 1994).

Earnings management ini tidaklah sejalan dengan semangat *good corporate governance*, karena rekayasa keuangan mengakibatkan informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat dan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunistik ini dinilai sebagai sikap curang (*fraud*) manajemen yang diimplikasikan dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi *intertemporal choice* (Beneish, 2001). Dengan demikian, manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na'im, 2000).

Skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan raksasa dunia seperti Enron dan Worldcom memperlihatkan bahwa *earnings management* yang menuju pada kecurangan akuntansi merupakan kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan. *Earnings management* tidak sejalan dengan semangat *good corporate governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi informasi yang akurat dan menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Adanya praktik seperti ini, kualitas laporan keuangan menjadi tidak baik, sehingga informasi akuntansi yang ada dalam

laporan keuangan ini tidak bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan.

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Penerapan *Good Corporate Governance* juga membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih jelas dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengawasannya. Ada lima prinsip utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran/kesetaraan. Kelima prinsip *good corporate governance* ini penting karena terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan performa perusahaan secara keseluruhan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.

Oleh karena itu, dalam buku ini akan dibahas bagaimana penerapan *good corporate governance* untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan penerapan asas-asas *good corporate governance* yang terdiri atas: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*), kualitas laporan keuangan perusahaan dapat menjadi lebih baik. Peningkatan kualitas laporan keuangan dalam hal ini berarti laporan keuangan yang

dihasilkan perusahaan dapat berguna bagi proses pengambilan keputusan pemakainya. Hal ini memberi makna bahwa informasi akuntansi yang dihasilkan dalam laporan keuangan mengandung karakteristik kualitatif relevan dan reliabel. Selanjutnya, peningkatan kualitas laporan keuangan juga berarti minimalisasi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi pemakai laporan tersebut.

KONSEP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Secara umum, *corporate governance* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan (Syed dan Safdar, 2009)

Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager, dkk. 2003). Dalam terjemahan bebas, *good corporate governance* adalah tata kelola perusahaan dengan baik. Akan tetapi, sebagai suatu konsep, *good corporate governance* ternyata tak memiliki definisi tunggal. Ball (1998) dalam Evans, dkk. (2002), mengartikan *corporate governance* sebagai seperangkat kesepakatan atau aturan institusi yang secara efektif mengatur pengambilan keputusan. Lebih jauh Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu

mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau *return* dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.

Selanjutnya, menurut Komite Cadbury (1992), *good corporate governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* pada khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Sedangkan OECD (*organisation for economic co-operation and development*) (2004) dan FCGI (*Forum for corporate governance* di Indonesia) (2001) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemangku kepentingan lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN adalah: "Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang

dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya. *Good corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

2.2. Latar Belakang Munculnya *Good Corporate Governance*

Secara umum, munculnya *good corporate governance* dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni alasan akademis dan alasan praktis (Haryono, 2014). Dari latar belakang akademis, kebutuhan akan *good corporate governance* ini timbul dari teori-teori yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Sedangkan, ditinjau dari perspektif praktis, kebutuhan akan *good corporate governance* muncul tatkala perusahaan-

perusahaan besar di Amerika Serikat, diantaranya Enron dan Worldcom dan auditor besar Arthur Andersen, berguguran akibat tata kelola manajemen yang buruk.

Dari latar belakang akademis, terdapat dua teori utama yang terkait dengan *good corporate governance*, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory* (Chinn, 2000; Shaw, 2003). *Stewardship theory* melihat manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* berdasarkan asumsi bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai 'agents' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan

ketentuan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs* (biaya keagenan).

Bringham dan Daves (2004) menyatakan bahwa, biaya keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham sebagai upaya mendorong direksi agar dapat bekerja memaksimalkan harga saham bukannya bekerja sebagai kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, menurut McKnight dan Weir (2009) biaya keagenan disebabkan oleh kepentingan pemilik dan manajer yang tidak sejalan sebagai akibat pemisahan antara pemilik dan pengelola. Perbedaan kepentingan yang terjadi memicu manajer untuk bertindak oportunistik. Para manajer terdorong untuk mengambil alih sumber daya bisnis, yang kalau tidak dilakukan, akan memberikan pengembalian (*return*) kepada pemilik (Miller dan Breton, 2006).

Dalam teori keagenan, *corporate governance* dibutuhkan karena adanya hubungan antara *principal* (pemilik modal/*shareholders*) dan *agent* (manajemen) dan konflik yang muncul dari hubungan kedua pihak tersebut. Dalam teori keagenan, *corporate governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan.

Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen. Masalah keagenan yang muncul antara *principal* dan agent mendorong penerapan *good corporate governance* yang diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan (Kamyarta, 2007). Penjelasan lebih lanjut mengenai teori keagenan dan dalam hubungannya dengan *good corporate governance* akan disajikan pada bab berikut.

Selanjutnya dari sisi praktis, urgensi akan *good corporate* adalah akibat skandal finansial yang melibatkan perusahaan raksasa dunia. Kebangkrutan Enron Inc. merupakan salah satu contoh nyata pengelolaan perusahaan yang bobrok. Enron adalah perusahaan raksasa energi yang pada tahun 2000 mencatat omset bisnis sebesar sekitar US\$ 100 miliar, nilai yang kurang lebih sama dengan total pendapatan kotor negeri sebesar Indonesia pada tahun yang sama. Akan tetapi, pada kenyataannya perusahaan tersebut telah memanipulasi laporan keuangan mereka selama 4 tahun berturut-turut untuk mendapatkan *performance* yang sehat. Manajemen Enron rupanya melakukan pembohongan publik. Dengan bersekongkol bersama akuntan publiknya, Arthur Andersen, Enron berhasil mengecoh publik dengan membuat laporan yang direkayasa. Akibat dari kasus ini, Enron dinyatakan pailit dan bangkrut dengan kerugian ratusan triliun.

Skandal finansial yang terjadi pada perusahaan besar seperti Enron, mendorong munculnya *good corporate governance*. Dengan adanya *good corporate governance* diharapkan tidak akan timbul lagi kasus-kasus serupa yang merugikan investor.

Dari perspektif yang lain, penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Dorongan dari etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (*regulatory driven*) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Good Corporate Governance di Indonesia sendiri mulai dikenal pada akhir tahun 1990an, saat krisis ekonomi melanda. *Corporate governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu alasan terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan

operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Kemudian pada tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mengeluarkan dan menyempurnakan Pedoman *Good Corporate Governance*.

2.3. Prinsip *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya, esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Kaihatu, 2006). Oleh karena itu, tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Arifin, 2005). Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara khusus, beberapa tujuan *good corporate governance* adalah:

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang

elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

Dalam mewujudkan *good corporate governance*, diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan.

Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, terdapat beberapa prinsip dasar praktik *good corporate governance*. Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006), ada 5 asas *good corporate governance*. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Prinsip Good Corporate Governance

a. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara

tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Berdasarkan prinsip dasar ini, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa

semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaannya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Juga, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup

kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

BAB III

INFORMASI AKUNTANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN

Belkaoui (2001) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan dan terutama digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan dan implementasi keputusan. Agar data keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai.

Informasi akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akuntansi keuangan (Anthony dan Reece, 1989). Informasi operasi menyediakan data mentah bagi informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Sebagai contoh, informasi operasi yang terdapat pada perusahaan manufaktur antara lain: informasi produksi, informasi pembelian dan pemakaian bahan baku, informasi penggajian, dan informasi penjualan.

Sedangkan informasi akuntansi manajemen adalah informasi akuntansi yang khusus ditujukan untuk kepentingan manajemen (Anthony dan Reece, 1989). Informasi ini digunakan dalam tiga fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi implementasi dan fungsi pengendalian. Informasi akuntansi manajemen ini dihasilkan oleh sistem pengolahan informasi keuangan yang disebut akuntansi manajemen (Hansen dan Mowen, 2005). Informasi akuntansi manajemen ini disajikan kepada manajemen perusahaan dalam berbagai laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, dan laporan biaya menurut aktivitas.

Informasi akuntansi keuangan digunakan baik oleh manajer maupun pihak eksternal perusahaan, dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2015). Informasi akuntansi keuangan untuk pihak luar disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

Pihak luar yang menggunakan laporan keuangan meliputi pemegang saham, kreditur, badan atau lembaga pemerintah, dan masyarakat umum dimana masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda.

Informasi ini disajikan dan disusun berdasarkan aturan dasar yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Berkaitan dengan jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, terdapat dua jenis sifat informasi yang diungkapkan. Menurut Penmann (1988), 2 jenis sifat informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan ini adalah *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure*. Informasi yang bersifat *mandatory disclosure* merupakan informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan karena memang diwajibkan oleh peraturan atau undang-undang. Sedangkan *voluntary disclosure* merupakan jenis informasi yang secara sukarela diungkapkan di dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menambah kegunaan informasi mengenai kekayaan dan hasil operasi suatu perusahaan kepada para pemakai laporan keuangannya. Informasi yang bersifat *voluntary disclosure* ini berperan untuk melengkapi informasi yang bersifat *mandatory disclosure* yang diharapkan dapat meningkatkan kegunaan informasi dalam laporan keuangan.

Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan dapat ditinjau dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni:

- 1) bermanfaat untuk pengambilan keputusan,
- 2) relevan (mempunyai nilai prediksi, nilai umpan balik, dan tepat waktu),
- 3) reliabel (bisa didiversifikasi, netral, dan representatif),
- 4) bisa diperbandingkan (termasuk konsistensi),
- 5) manfaat lebih besar dibandingkan biaya material

Selanjutnya kualitas pelaporan juga digolongkan ke dalam dua kelompok atribut, yakni atribut-atribut yang berbasis pada akuntansi, dan atribut-atribut yang berbasis pada pasar. Atribut kualitas pelaporan keuangan yang berdasar akuntansi yaitu *accrual quality, persistence, predictability, smoothness*. Sedangkan atribut-atribut kualitas pelaporan keuangan berdasarkan pasar yaitu relevansi nilai, *timelines*, dan konservatisme (Francis, dkk. 2004).

Laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan laporan keuangan yang ada dalam pernyataan SFAC No. 1 sebagai berikut (FASB, 1980) sebagai berikut:

First objective of financial statements is to provide information useful to investors for making rational investment etc. decisions, Second objective of financial statements is to provide information about amount, timing and uncertainty of prospective cash receipts.

Disamping itu, pernyataan CICA handbooks seksi 1000 sebagai berikut:

The objective of financial statements is to communicate information to investors and other users in making decisions regarding

*resource allocation and assessment of
management stewardship*

Komite *Trueblood* yang dibentuk oleh AICPA pada bulan April tahun 1971 (Wolk et. al, 2004) mencatat sejumlah tujuan laporan keuangan, yaitu:

1. Tujuan dasar laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomis.
2. Tujuan laporan keuangan adalah memenuhi sebagian besar pengguna yang memiliki otoritas, kemampuan atau resources terbatas untuk mendapatkan informasi dan yang bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber informasi utama mengenai kegiatan ekonomi perusahaan.
3. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi arus kas potensial dalam hal jumlah, waktu dan yang terkait dengan ketidakpastian.
4. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan penggunaannya informasi untuk memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi kekuatan earning perusahaan.
5. Tujuan laporan keuangan adalah untuk mensupply informasi yang berguna dalam menilai kemampuan manajemen dalam menggunakan *resource*

perusahaan secara efektif dalam mencapai tujuan utama perusahaan.

6. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang faktual dan interpretif mengenai transaksi dan even lainnya, yang berguna memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi kekuatan *earning* perusahaan. Asumsi dasar yang berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan intepretasi, evaluasi, prediksi, atau estimasi harus diungkapkan.
7. Sebuah tujuan adalah untuk menyediakan laporan posisi keuangan yang berguna untuk memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi kekuatan *earning* perusahaan. Laporan ini harus menyediakan informasi mengenai transaksi perusahaan dan kejadian lain yang merupakan bagian *earning cycle* yang tidak lengkap. Nilai sekarang harus dilaporkan saat berbeda dengan nilai historis. Aset dan liabilitas dikelompokkan menurut ketidakpastian jumlah dan timing realisasi atau likuidasi.
8. Tujuan adalah menyediakan laporan *earnings periodic* yang berguna untuk memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi kekuatan *earning* perusahaan. Hasil bersih siklus *earnings* dan aktivitas perusahaan menghasilkan kemajuan penyelesaian siklus yang tidak lengkap harus dilaporkan. Perubahan dalam nilai pada laporan

berikutnya harus juga dilaporkan secara terpisah, karena berbeda dalam hal realisasi atau kepastian.

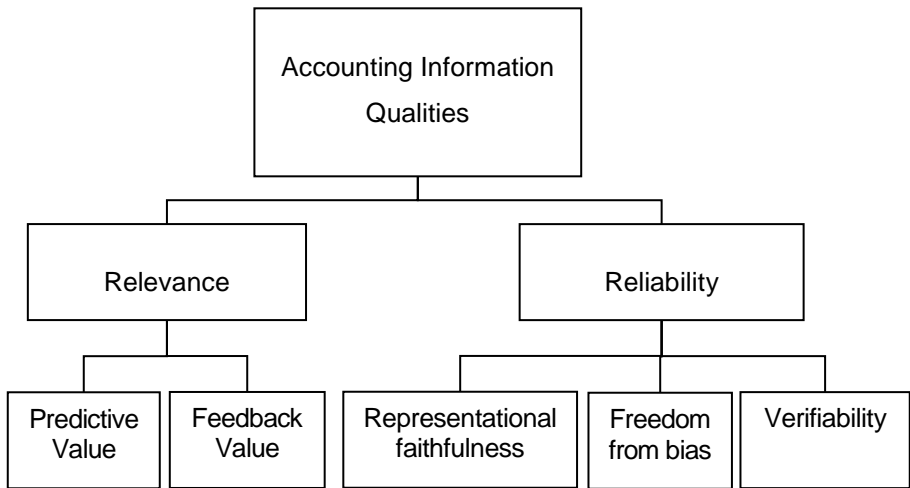
9. Tujuan lainnya adalah menyediakan laporan kegiatan finansial yang berguna memprediksi, membandingkan dan mengevaluasi kekuatan earning perusahaan. Laporan ini harus melaporkan aspek factual dari transaksi perusahaan yang memiliki atau diharapkan memiliki konsekuensi kas yang signifikan. Laporan ini harus melaporkan data yang memerlukan judgement dan interpretasi yang minimal dari yang menyiapkan laporan keuangan tersebut.
10. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam proses *perdictive. Forecast* finansial harus disediakan saat mereka akan meningkatkan reliabilitas dari prediksi pengguna.
11. Tujuan laporan keuangan untuk pemerintah dan organisasi non profit adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi keefektifan manajemen sumberdaya dalam mencapai tujuan organisasi. Ukuran kinerja harus terkuantifikasikan dalam hal tujuan yang diidentifikasi.
12. Tujuan laporan keuangan adalah untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang mempengaruhi masyarakat yang dapat ditentukan dan

dideskripsikan atau diukur dan yang penting baik peran perusahaan dalam lingkungan sosialnya.

Dari beberapa tujuan laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut haruslah bermanfaat bagi pemakainya dalam membantu proses pengambilan keputusan pemakain laporan keuangan tersebut. Untuk itulah harus dipahami bahwa laporan keuangan perusahaan lebih dari sekedar angka karena mengandung informasi yang berguna bagi para penggunanya. Akan tetapi, kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor tidak terlepas dari permasalahan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu reliabilitas dan relevansi (Scott, 2009), seperti yang digambarkan pada gambar berikut.

FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concept No.2*, menyatakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pembuatan keputusan. Informasi yang dapat dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan.

Sebaliknya, informasi relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka pada masa lalu (IAI, 2015).



Gambar 2 Accounting Information Qualities

(Sumber: diadaptasi dari Scott (2009))

Menurut Kieso dan Weygandt (1995), informasi akuntansi dapat dikatakan relevan jika mempunyai nilai prediktif dan nilai umpan balik. Sebaliknya, informasi akuntansi dapat dikatakan andal (*reliable*) jika memenuhi tiga karakteristik utama, yaitu jujur dalam penyajian, dapat diuji, dan netral.

Informasi akuntansi dikatakan mempunyai nilai prediktif berarti bahwa Informasi dapat memberi pengaruh pada satu keputusan dengan menambah atau memperbaiki kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi.

Sebagai contoh, jika dilaporkan laba per lembar saham akan membantu memprediksi bagi pemberi pinjaman yang ada, dan juga laba per lembar saham memiliki nilai prediksi bagi seorang pegawai bank untuk satu pinjaman bank. Sedangkan, informasi akuntansi yang mempunyai nilai umpan balik adalah jika informasi dapat mempengaruhi satu keputusan untuk tetap melakukan atau memperbaiki harapan pembuat keputusan sebelumnya.

Sebagai contoh, Jika dilaporkan laba per lembar saham yang dikonfirmasi pada harapan para pemegang saham tentang kemampuan perusahaan memperoleh laba perlembar saham atau menyebabkan pemegang saham merubah harapannya, tentunya laba per lembar saham telah memberikan nilai umpan balik kepada pemegang saham.

Sering informasi memberikan keduanya sekaligus, sebab pengetahuan tentang hasil dari suatu tindakan yang baru diperoleh secara umum akan memperbaiki kemampuan pembuat keputusan untuk memprediksi hasil seperti itu dimasa akan datang. Sebagai contoh, kesimpulan yang menyatakan perbaikan perolehan arus kas bersih setelah dilakukan akuisisi satu anak perusahaan, mungkin akan membantu para pemegang saham memprediksi arus kas bersih sebagai akibat akuisisi dimasa akan datang. Nilai prediksi dan nilai umpan balik sesuai dengan objektivitas laporan keuangan kedua yang menyajikan informasi membantu para pengguna memprediksi dan menentukan arus kas yang akan diperoleh.

Berkaitan dengan aspek reliabilitas, informasi akuntansi yang dihasilkan dalam laporan keuangan harus merupakan ungkapan yang jujur. Hal ini berarti bahwa terdapat kesesuaian antara satu ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Untuk dikatakan *reliable*, informasi akuntansi juga harus dapat diuji untuk meningkatkan jaminan bahwa pengukuran-pengukuran akuntansi menyatakan apa yang terukur pada saat itu. Selanjutnya masih dalam hubungannya dengan reliabilitas, untuk dikatakan netral, informasi akuntansi tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku para pengguna informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias. Kemudian, informasi akuntansi yang *reliable* juga berarti bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan.

Scott (2009) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang *reliable* berarti bahwa informasi yang terdapat didalamnya menginformasikan apa yang benar-benar ingin disampaikan tanpa bias. Menurut Scott (2009) reliabilitas itu memiliki 3 dimensi yaitu *representational faithfulness*, *freedom from bias* dan *verifiability*.

Representational faithfulness bermakna bahwa *accounting valuation* atau penjelasan suatu item dalam laporan keuangan harus berhubungan dengan item sebenarnya yang diwakili. Misalnya, adanya kesalahan dalam estimasi pada

laporan keuangan. Contoh lainnya adalah seperti yang terjadi pada kasus Enron dimana pada valuasi *long term debt* beberapa utang tersebut merupakan *item off-balance sheet*.

Freedom from bias adalah bahwa informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan haruslah bebas dari manipulasi. Jika *accounting valuation* dalam laporan keuangan sudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan manajemen, maka informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tersebut tidaklah memenuhi dimensi *freedom from bias*.

Kemudian dimensi *verifiability* berarti bahwa akuntan dan auditor yang berbeda akan menghasilkan nilai yang sama. Jadi metode yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan oleh satu akuntan, akan menghasilkan nilai yang sama pada akuntan yang lain. *Statement of Financial Accounting Concept No. 2* menyatakan bahwa "*verifiable financial accounting information provides results that would be substantially duplicated by independent measurers using the same measurement methods.*" Dengan itu, verifikasi menekankan satu konsensus diantara para akuntan dalam pengukuran kejadian-kejadian ekonomi dan cara untuk melaporkannya. Sebagai contoh, jumlah kas dilaporkan dalam neraca memiliki daya uji yang tinggi. Nilai buku dari harta yang dapat disusutkan, tentu memiliki daya uji yang rendah disebabkan para akuntan dapat menggunakan metode yang berbeda dalam menentukan nilai perolehan, nilai sisa, taksiran umur pakai dari harta tersebut. Objektivitas sering digunakan sebagai satu sinonim dari *verifiability*.

Bachtaruddin (2003) mengemukakan bahwa informasi akuntansi yang relevan berarti bahwa informasi akuntansi berkemampuan untuk membuat perbedaan didalam satu keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan. Jika informasi memberi ketegasan atas harapan, berarti memberikan peningkatan kemungkinan hasil yang diharapkan. Jika memberi pengaruh perubahan atas harapan, berarti memberikan perubahan pemikiran atas kemungkinan perolehan penghasilan yang sebelumnya telah diharapkan. Dengan cara demikian, informasi yang relevan memberikan satu perbedaan bagi seorang pengambil keputusan yang tidak bersiap memperoleh informasi itu.

Scott (2009) mengemukakan bahwa, informasi sebagai produk akuntansi, menyebabkan kompleksitas lingkungan akuntansi dan laporan keuangan. Kompleksitas tersebut dipengaruhi 2 hal:

1. Tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap informasi. Ada investor yang bereaksi positif terhadap informasi karena informasi dianggap membantu dalam memprediksi kinerja perusahaan. Hasil studi empiris Ball and Brown (1968) memperlihatkan bahwa pada tahun-tahun perusahaan mengalami residual earnings positif akan cenderung juga memperlihatkan perubahan residual harga saham positif, yang berarti pada saat

informasi dalam laporan keuangan positif (*residual earnings positif*), investor akan bereaksi secara positif yang direfleksikan dengan perubahan residual harga saham positif.

Selanjutnya, ada juga investor yang bereaksi kurang positif terhadap informasi karena informasi tidak bisa diandalkan atau karena informasi tersebut bersifat historis. Studi empiris Beaver dan Morse (1978) mengkonfirmasi hal ini. Penelitian ini menemukan bahwa saham-saham yang memiliki *price-earnings ratio* yang tinggi pada akhir tahun telah mengalami pertumbuhan *earnings* yang rendah pada tahun tersebut. Terlihat bahwa adanya anomali bahwa saham dengan *price-earning* yang tinggi mempunyai *growth* yang rendah. Hal ini berarti adanya reaksi kurang positif dari investor akan informasi earnings dalam laporan keuangan perusahaan.

2. Informasi keuangan tidak hanya mempengaruhi keputusan individual, melainkan juga mempengaruhi pergerakan pasar, seperti pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja. Hasil penelitian-penelitian akuntansi pasar modal jelas memperlihatkan hubungan antara informasi yang terkandung dalam earnings dengan pergerakan harga saham di pasar modal (Ball and Brown, 1968; Beaver, Clarke and Wright, 1979). Studi empiris oleh

Gupta dan Fields (2009) juga mengkonfirmasi bahwa informasi keuangan dalam hal ini pengumuman board resignation, dalam hal ini *outside director resignations* mengirim signal negatif terhadap market partisipan.

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa suatu informasi akuntansi dikatakan berguna apabila informasi tersebut relevan dan reliable. Namun, simpulan dari diskusi *Reserve Recognition Accounting* (RRA) menyatakan bahwa tidak mungkin menyiapkan laporan keuangan dengan tingkat reliabilitas dan relevansi secara penuh karena konsekuensinya akan terjadi *trade-offs* antara reliabilitas dengan revelansi (Scott, 2009; FASB, 1980).

RRA merupakan metode akuntansi yang diaplikasikan pada perusahaan minyak dan gas, yang merupakan pengaplikasian *present value accounting* (Scott, 2009). Scott (2009) mengemukakan bahwa penggunaan metode RRA memang meningkatkan relevansi dalam laporan keuangan, karena dalam metode ini nilai aset didasarkan pada *expected present values* dari aset tersebut, yakni nilai *proved reserves* akan langsung meningkat pada saat terjadi peningkatan jumlah dan harga reserves tersebut.

Jika dibandingkan dengan pengaplikasian *historical cost accounting*, perubahan harga dan jumlah tidak secara langsung akan meningkatkan nilai reserve, akan tetapi peningkatan ini nanti akan diakui pada saat adanya penjualan. Pengakuan peningkatan aset yang belum terealisasi, atau dengan kata lain

pengakuan revenue lebih cepat, akan meningkatkan relevansi, karena investor menerima informasi lebih awal mengenai future cash flow.

Akan tetapi, pengakuan yang lebih awal ini, menurunkan reliabilitas, karena besarnya perubahan nilai aset ini berdasarkan estimasi dan masing-masing individu yang menyiapkan laporan keuangan memiliki asumsi yang berbeda mengenai jumlah dan waktu lifting dan penjualan minyak dan gas. Perlunya estimasi ini juga dapat menciptakan kesempatan bagi manajer untuk bias. Subjektivitas dalam estimasi kuantitas reserves diilustrasikan dengan kasus Royal Dutch/Shell, perusahaan besar dengan reputasi baik sejak dulu, harus kehilangan reputasi baik tersebut akibat *proved reserves overstating* sehingga pada bulan Januari 2004, perusahaan ini harus mengurangi *proved reserves*, yang berakibat pada turunya harga saham perusahaan tersebut (Scott, 2009).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kepentingan dan pengaturan dari *standard setter* tentang karakteristik kualitatif yang harus dilaksanakan. Oleh karena hal ini, terjadilah *trade-offs* antara reliabilitas dan relevansi dalam menyajikan data-data kuantitatif di laporan keuangan.

BAB IV

PENDEKATAN *DECISION USEFULNESS* DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Secara umum, tujuan pembuatan laporan keuangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk membantu pemakainya dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar dapat membantu proses pengambilan keputusan secara maksimal informasi akuntansi haruslah reliabel sekaligus relevan. Akan tetapi, laporan keuangan yang biasanya disiapkan oleh perusahaan pada umumnya merupakan pengaplikasian dari *historical cost accounting* dan bukan berdasarkan *present value accounting*. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tersebut kurang relevan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan lain untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu bagaimana laporan keuangan lebih berguna bagi para penggunanya sebagai pemakai informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

4.1. Pendekatan *Decision Usefulness*

Untuk mengatasi permasalahan *trade-off* relevansi dan reliabilitas, digunakanlah pendekatan *decision usefulness*. Scott (2009) mengemukakan bahwa dalam pendekatan *decision usefulness* memandang bahwa jika para akuntan tidak dapat

menyiapkan laporan keuangan yang secara teoritis benar, setidaknya-tidaknya akuntan harus mencoba untuk menyiapkan laporan keuangan yang bermanfaat.

Kemudian, Chambers (1955) menyajikan suatu artikel yang menjadi titik tolak teori *decision usefulness* dalam akuntansi keuangan, yang menyatakan bahwa:

Oleh karenanya, akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan... Sistem yang menyajikan informasi secara formal yang sejalan dengan dua proposisi umum: Pertama, suatu kondisi dari semua tulisan yang logis. Sistem tersebut seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua, proposisi muncul dari kegunaan laporan akuntansi sebagai suatu dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik. Informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pengambilan keputusan yang diharapkan dapat digunakan.

Pendekatan *decision usefulness* merupakan suatu pendekatan terhadap laporan keuangan yang berdasarkan biaya historis agar lebih berguna. Scott (2009) menekankan bahwa dalam mengadopsi pendekatan ini, ada 2 pertanyaan utama yang harus dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah siapa pengguna laporan keuangan? Sangatlah jelas bahwa ada banyak pihak yang menggunakan laporan keuangan. Untuk mempermudah pemakai laporan keuangan ini dikelompokkan ke dalam kelompok besar seperti, investor, kreditor, manajer, serikat pekerja, penyusun standar dan pemerintah. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai konstituen akuntansi.

Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah apa permasalahan dalam pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan tersebut? Dengan memahami permasalahan ini, akuntan akan menjadi lebih siap dalam menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan berbagai konstituen. Dengan kata lain, laporan keuangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemakainya yang akan menuju pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan cara ini, laporan keuangan dapat bermanfaat.

Tentu saja, dalam menentukan kebutuhan khusus pengguna laporan keuangan ini bukanlah merupakan proses yang mudah dan jelas. Misalnya, informasi apa yang dibutuhkan oleh pemegang utang jangka panjang perusahaan agar dapat membuat keputusan yang rasional untuk menjual holding tertentu? Apakah keputusan ini akan membantu atau

malah menghalangi dengan melakukan penilaian utang jangka panjang pada nilai saat ini (*fair value*).

Dalam menghadapi pertanyaan yang sulit seperti ini, akuntan menjawabnya dengan bantuan teori-teori dalam ekonomi dan finance. Dalam menjelaskan pendekatan *decision usefulness* ini, Scott (2009) menggunakan 2 teori yaitu *single person decision theory* dan *theory of investment*. Kedua teori ini akan membantu penyediaan informasi akuntansi yang berguna bagi pemakai laporan keuangan, khususnya investor. Fokus perhatian dalam menjelaskan pendekatan *decision usefulness* melalui kedua teori tersebut adalah kepada investor sebagai pemakai laporan keuangan atau sebagai konstituen akuntansi.

Teori *decision usefulness* yang mendasari kegunaan informasi akuntansi bagi kreditor tidak berkembang dengan baik seperti peran angka akuntansi terhadap *stock prices*. Akan tetapi, secara umum disetujui bahwa harga *interest-bearing debt* didasarkan pada default risk, yang didefinisikan sebagai *premium in excess of risk free interest rate*. Jadi, informasi spesifik termasuk data akuntansi membantu kreditor dalam menilai default risk.

Tanpa mengesampingkan konstituen yang lain, investor diberikan perhatian sebagai pemakai laporan keuangan karena dalam proses pengambilan keputusan oleh investor umumnya lebih kompleks, sehingga pengambilan keputusan investor lebih berisiko dibanding pengguna laporan keuangan yang lain. Penyiapan informasi laporan keuangan yang sesuai untuk kebutuhan investor akan mampu memperbaiki proses

pengambilan keputusan dan dengan demikian laporan keuangan disebut lebih bermanfaat bagi investor.

4.2. *Single Person Decision Theory dalam Decision Usefulness Approach*

Single person decision theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang (dalam hal ini investor) mengambil keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. Keputusan rasional yang dimaksud dalam teori ini adalah keputusan yang diambil oleh investor yang dapat memaksimalkan utilitasnya. Dalam teori ini dijelaskan konsep informasi dan bagaimana informasi tersebut mampu mempertajam keyakinan subjektif seseorang tentang manfaat masa depan (*future payoff*) atas keputusan yang diambil.

Decision theory ini erat kaitannya dengan akuntan, karena laporan keuangan yang disiapkan oleh akuntan menyediakan informasi tambahan yang berguna dalam membuat berbagai keputusan bagi berbagai pemakai laporan keuangan tersebut. Bagi investor sebagai pemakai utama informasi dalam laporan keuangan, informasi tersebut dikatakan berguna jika dapat membantu investor dalam memprediksi return investasi di masa depan.

Dalam kondisi non ideal, laporan keuangan tidak dapat menunjukkan kinerja perusahaan secara langsung. Akan tetapi, laporan keuangan tersebut akan berguna bagi investor jika informasi, baik ataupun buruk, yang terkandung di dalamnya *persist* dimasa depan. Jika hubungan antara informasi dalam

laporan keuangan dan kinerja perusahaan masa depan lemah, dimana informasi dalam laporan keuangan kurang bisa memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, maka dikatakan sebagai kualitas *earning* yang rendah dalam laporan keuangan. Sebaliknya, jika informasi dalam laporan keuangan tersebut memberikan prediksi yang baik untuk kinerja perusahaan di masa depan maka dikatakan sebagai kualitas *earning* yang tinggi.

Untuk membuktikan bagaimana informasi, khususnya informasi dalam laporan keuangan, digunakan oleh investor untuk dapat memberikan manfaat masa depan, Easton dan Zmijewski (1989) melakukan penelitian terhadap revisi *earnings forecast* analisis berdasarkan *current earning* terhadap 150 perusahaan besar di Amerika Serikat. Analisis ini merepresentasikan investor rasional yang menggunakan informasi laporan keuangan untuk menilai *future performance* perusahaan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa revisi *earnings forecast* meningkat apabila *current earnings* yang dilaporkan juga meningkat, dan sebaliknya jika *current earnings* yang dilaporkan turun maka *revisi earnings forecast* juga akan menurun.

Single decision theory ini penting bagi akuntan karena teori ini akan membantu akuntan untuk dapat memahami mengapa informasi akuntansi merupakan suatu komoditas berharga yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh investor. Sebagai penyedia informasi bagi investor, akuntan perlu memahami peran informasi sebagai suatu komoditas

berharga sehingga dapat menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan investor.

4.3. Theory of Investment dalam Decision Usefulness approach

Theory of investment merupakan teori yang mempelajari tentang komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan pada masa yang akan datang (Tandelilin, 2001). Misalnya, seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen pada masa yang akan datang.

Theory of investment merupakan teori yang membantu menjelaskan perilaku investor yang diasumsikan *risk averse*. Seorang *risk averse* investor akan bertoleransi dengan suatu tingkat risiko tertentu dengan imbalan suatu tingkat *return* tertentu. Hal ini memberi makna bahwa semakin tinggi tingkat risiko suatu investasi akan semakin tinggi pula tingkat *return* yang diminta.

Salah satu cara investor dapat mentukan risiko untuk tingkat *return* tertentu adalah dengan mengadopsi strategi diversifikasi, yaitu dengan berinvestasi pada portfolio sekuritas (Scott, 2009). Prinsip diversifikasi portfolio menunjukkan bahwa beberapa risiko dapat dieliminasi dengan strategi investasi yang tepat, walaupun tidak semua risiko dapat dieliminasi. Prinsip ini memiliki implikasi mengenai informasi risiko yang dibutuhkan oleh investor. Risiko yang dilaporkan oleh kebanyakan ukuran

berbasis akuntansi yang umum seperti, *current ratio*, dapat dieliminasi dengan diversifikasi yang tepat.

Prinsip diversifikasi ini membawa pada ukuran risiko yang penting untuk sebuah sekuritas dalam *theory of investment*. Ukuran risiko ini adalah beta, yang mengukur pergerakan antara perubahan harga sebuah sekuritas dan perubahan dalam nilai pasar dari *market portfolio*. Pemahaman akan beta suatu saham sekaligus apa yang digambarkan beta tersebut mengenai tingkat risiko suatu perusahaan adalah bagian penting dari pengetahuan akuntan.

Riset pasar modal menginvestigasi *usefulness accounting* number untuk menilai risiko sekuritas dan portofolio. Penelitian ini menemukan korelasi tinggi antara variabilitas *accounting earnings* dan beta. Korelasi yang tinggi ini mengimplikasikan bahwa data akuntansi berguna dalam menilai risiko. Studi lainnya juga menguji hubungan antara rasio finansial dengan beta. Secara umum, pengujian ini mengindikasikan hubungan yang kuat antara rasio berbasis akuntansi dan ukuran risiko pasar yakni beta.

Theory of investment, secara khusus teori portofolio, merupakan fondasi dari perkembangan berkaitan dalam *finance*, yaitu pricing dari saham individu lewat konsep portofolio terdiversifikasi. Model yang disebut *capital asset pricing model* yang dikembangkan oleh *teoritis pricing individual stock*.

Tahap yang pertama adalah menghubungkan risiko dengan sekuritas individual relative terhadap pasar secara

keseluruhan. Korelasi dibuat antara return saham individual dan return pasar pada suatu periode waktu. Analisis regresi digunakan untuk menggambar garis pada *scattergram*. Slope dari garis adalah beta dan merupakan ukuran berbasis pasar atas risiko sistematis sekuritas individual terhadap risiko rata-rata pasar secara keseluruhan. Jika beta sama dengan 1, return secara sempurna berasosiasi dan risikonya sama. Jika beta lebih dari return dari saham individual lebih besar dari pasar, dengan kata lain risiko sistematis juga lebih besar.

Dengan *theory of investment*, karakteristik risiko dan konteks investasi portfolio bagi investor akan diperjelas. Dalam teori ini, investor yang *risk averse* akan bisa mendapat pengurangan risiko. Pengurangan risiko ini terjadi karena state untuk perusahaan secara spesifik telah disebar dalam berbagai sekuritas. Kontributor yang masih ada terhadap risiko adalah faktor ekonomi. *Theory of investment* akan membantu pemahaman karakteristik investor yang berhubungan dengan risiko yang menjadi faktor penting bagi investor dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi akuntansi.

4.4. Decision Usefulness: Information Approach & Measurement Approach

Pendekatan informasi dalam *decision usefulness* adalah pendekatan terhadap pelaporan keuangan yang mengakui tanggung jawab individual untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan dan yang memfokuskan untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk tujuan ini. Pendekatan ini berasumsi efisiensi pasar sekuritas, yang mengakui bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi yang berguna dari sumber manapun, termasuk laporan keuangan (Scott, 2009).

Dari perspektif informasi tersebut pelaporan keuangan menyajikan satu sistem informasi yang bersaing dengan yang sumber informasi yang lain (Christensen dan Demski, 2003). Oleh karena itu, dalam merespons informasi laporan keuangan ada pertimbangan untuk prediksi tentang perilaku investor (Scott, 2009) yaitu:

- Investor mempunyai keyakinan tentang laba yang diharapkan dan risiko yang diterima dari saham perusahaan. Keyakinan ini didasarkan pada seluruh informasi publik yang tersedia. Keyakinan sebelumnya (*prior belief*) investor yang didasarkan pada informasi yang telah tersedia tidak sama. Ketidaksamaan tersebut dipengaruhi oleh besar-kecilnya informasi yang diperoleh dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi.
- Dengan masuknya informasi baru, berupa laba perusahaan, investor akan memperoleh informasi lebih dan akan merevisi ekspektasinya. Sebagai contoh jika terjadi kenaikan laba yang lebih tinggi daripada yang diharapkan, ini merupakan berita baik. Beberapa investor dengan teori Bayes akan merevisi (*upward*) keyakinan mereka tentang kekuatan laba pada masa

yang akan datang. Namun, sebagian investor lain yang sebelumnya memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, lebih tinggi dari laba perusahaan yang diumumkan, mungkin akan menginterpretasikan informasi laba tersebut sebagai berita buruk (*downward*). Investor yang merevisi ekspektasi mereka tentang laba pada masa yang akan datang akan bersedia membeli sekuritas pada harga yang berlaku saat ini. Sedangkan investor yang merevisi ekspektasinya *downward* akan melakukan sebaliknya.

- Kita dapat mengobservasi jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan munculnya informasi baru berupa laba ini. Seharusnya volume perdagangan akan semakin besar dengan semakin besarnya perbedaan ekspektasi antara investor yang bersikap *upward* dengan yang bersikap *downward*. Kelebihan ini adalah perbedaan-perbedaan dalam keyakinan awal para investor dan dalam interpretasi mereka pada informasi keuangan saat itu.
- Observasi mengenai perubahan volume perdagangan sebagai respons atas informasi dalam laporan keuangan diteliti oleh Beaver (1968). Dalam studi ini, Ia menemukan bahwa terjadi peningkatan volume pada minggu pengumuman *earnings*. Bahkan volume perdagangan terbesar terjadi pada hari dimana terjadinya pengumuman *earnings*.

Perspektif informasi dari *decision usefulness approach* ini mengakui bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi yang bermanfaat dari sumber manapun, termasuk laporan keuangan. Secara empiris, pertama kali Ball dan Brown (1968) menemukan bahwa pasar bereaksi terhadap komponen laba dalam informasi akuntansi. Hal ini berarti investor menggunakan informasi yang terkandung dalam laba untuk membantu pengambilan keputusannya.

Akan tetapi, berdasarkan berbagai studi empiris (Benston, 1966; Brown dan Kenelly, 1972; Foster, 1977; Patell dan Wolston, 1984) informasi *earnings* dalam laporan keuangan terlihat sebagai satu sumber informasi yang merubah harga pasar, walaupun *earnings* hanyalah satu diantara banyak sumber informasi. Seberapa pentingnya informasi *earnings* tersebut, tergantung pada perspektif yang diambil.

Selanjutnya, ada kemungkinan data lainnya mungkin saja sumber informasi *earnings*. Jika investor melihat *earnings* sebagai informasi yang penting, tidak mengherankan bahwa investor akan mencoba mendapatkan informasi lain yang membuat mereka dapat memprediksi *earnings*. Akan tetapi, penting untuk ditekankan bahwa bukti empiris tidak menunjukkan harga secara langsung berkorespondensi dengan *earnings*. Perubahan *earnings* dapat saja memperlihatkan signifikan asosiasi kontemporer karena mereka berkorelasi dengan data lain yang memberi reaksi pada harga.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif informasi pada kegunaan keputusan lebih menekankan pada isi

informasi (*content of information*) dalam memberikan keyakinan bagi investor atau mengubah keyakinan pengguna laporan keuangan agar segera bereaksi dan informasi ini bersaing dengan sumber informasi lain.

Karena investor menggunakan informasi akuntansi yang terkandung dalam laporan keuangan, diharapkan laporan keuangan dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, permasalahan fundamental dalam akuntansi keuangan adalah terdapat *trade off* antara reliabilitas dan relevansi dalam informasi laporan keuangan.

Perspektif *measurement* dalam *decision usefulness* adalah suatu pendekatan yang menuntut akuntan untuk melaksanakan tanggung jawab memasukkan *present value* terhadap laporan keuangan pokok, dengan reliabilitas yang masih rasional, yang berarti meningkatnya tanggungjawab akuntan untuk membantu investor dalam memprediksi kinerja masa depan perusahaan (Scott, 2009). Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan, tetapi tidak meninggalkan reliabilitasnya dalam rangka membantu investor mengambil keputusan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif pengukuran lebih menekankan pada nilai sekarang dalam mengukur aktiva, kewajiban, dan ekuitas karena hal tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Konsekuensinya adalah akan

terjadi penurunan tingkat reliabilitas dari laporan keuangan tersebut.

Walaupun demikian, beberapa alasan mengapa perspektif pengukuran semakin diakui adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian *Earning Response Coefficient* (ERC) menunjukkan bahwa kemampuan pasar sangat sulit untuk mendapatkan implikasi dari laporan keuangan yang disajikan dengan biaya histories. *Earnings Response Coefficient* merupakan ukuran sejauh mana return pasar abnormal suatu sekuritas dalam hubungannya dengan komponen yang tidak terekspektasi dari perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut.

Kedua, *prospect theory* yang menyatakan bahwa investor mempertimbangkan risiko investasi yang memisahkan evaluasi prospek evaluasi keuntungan dan kerugian. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa investor akan cenderung memilih sebuah investasi yang menghasilkan keuntungan yang cukup (sedang-sedang saja), tapi memiliki risiko rendah, dibandingkan investasi yang memiliki potensi hasil yang tinggi dan risiko tinggi.

Hal ini cukup wajar tergantung kepada minat terhadap risiko dari masing-masing investor. Akan tetapi ternyata dalam menghadapi kerugian, investor cenderung memilih untuk benar-benar membatasi pilihannya kepada yang berpotensi rugi lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa investor cenderung menilai kerugian lebih berat dibandingkan dengan keuntungan.

Ketiga, teori surplus bersih Ohlson menjelaskan konsistennya kerangka dasar dengan perspektif pengukuran

yang memperlihatkan bagaimana nilai pasar perusahaan, yang disebabkan oleh perputaran sekuritas dapat dipercepat pada waktu neraca fundamental dan komponen laporan pendapatan.

Teori ini mengasumsikan bahwa kondisi yang ideal meliputi tidak relevannya dividen dan keganjilan pasar efisien. Inti dari pendekatan dalam teori ini terletak pada tautology akuntansi dimana *ending book value of equity* sama dengan *beginning book value plus earnings minus dividen*.

Valuation firm's equity didasarkan pada *beginning period of book value plus the present value of expected future abnormal earnings*. *Abnormal earnings* adalah *earnings in excess of normal earnings*, jumlahnya *diferensial* diatas atau dibawah *expected normal earnings*. *Normal earnings* sama dengan *beginning of period book value multiplied by the cost of equity capital*. *The valuation of firm's equity* sama dengan *beginning book value of equity* ditambah *discounted present value of abnormal earnings*.

4.5. Kesimpulan atas Pendekatan *Decision Usefulness*

Berdasarkan ASOBAT dan laporan *Trueblood Committee*, pendekatan *decision usefulness* terhadap pelaporan keuangan mengimplikasikan bahwa akuntan perlu untuk memahami permasalahan keputusan dari pemakai laporan keuangan. *Single-person decision theory* menyajikan pemahaman akan kebutuhan investor *risk-averse rasional*. Teori ini mengemukakan bahwa investor membutuhkan informasi untuk

membantu mereka menilai *expected return* suatu sekuritas dan risiko dari return tersebut.

Teori keputusan relevan bagi akuntansi karena laporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan tersebut. Teori keputusan juga penting karena teori ini membantu akuntan untuk memahami mengapa informasi merupakan suatu komoditas berharga yang mempengaruhi tindakan yang dilakukan oleh investor. Akuntan, yang menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh investor, perlu memahami peran penting informasi tersebut.

Dalam teori investasi, dikemukakan bahwa beta merupakan ukuran risiko yang penting, dan merupakan komponen utama risiko portfolio yang didiversifikasi. Dengan *theory of investment karakteristik investor* yang berhubungan dengan risiko lebih mudah untuk dipahami, yang menjadi faktor penting bagi investor dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi akuntansi.

Riset pasar modal menginvestigasi *usefulness accounting* number untuk menilai risiko sekuritas dan portofolio. Penelitian ini menemukan korelasi tinggi antara variabilitas *accounting earnings* dan beta. Korelasi yang tinggi ini mengimplikasikan bahwa data akuntansi berguna dalam menilai risiko.

Studi lainnya juga menguji hubungan antara rasio finansial dengan beta. Secara umum, pengujian ini mengindikasikan hubungan yang kuat antara rasio berbasis akuntansi dan ukuran risiko pasar yakni beta.

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang penting dan *cost-effective* bagi investor, walaupun laporan ini tidak menyajikan secara langsung mengenai *payoffs* investasi di masa depan. Laporan keuangan menyediakan sistem informasi yang dapat menolong investor untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, yang pada akhirnya memprediksi *return* investasi di masa depan.

Beberapa studi empiris yang menguji apakah informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan berguna bagi investor dalam pengambilan keputusan menyimpulkan bahwa informasi akuntansi yakni informasi mengenai *earnings* memang digunakan oleh pasar. Walaupun informasi *earnings* bukan satu-satunya informasi yang digunakan oleh investor.

BAB V

ASIMETRI INFORMASI DALAM LAPORAN KEUANGAN

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, laporan keuangan digunakan oleh para pemakainya untuk menilai kinerja perusahaan dan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Informasi akuntansi tersebut tidak terlepas dari kualitas *relevance* dan *reliability*, dimana terdapat *trade-off* antara keduanya. Sehingga, pendekatan *decision usefulness* digunakan agar supaya informasi akuntansi yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat bagi para pemakainya, yang dalam hal ini difokuskan pada investor sebagai pemakai laporan keuangan.

Akan tetapi permasalahan yang dihadapi pemakai laporan keuangan tersebut, bukan hanya permasalahan karakteristik laporan keuangan itu sendiri. Manajer sebagai pihak internal yang merupakan pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pihak eksternal sebagai pihak pemakai laporan keuangan tersebut.

Sedangkan pemilik atau para pemegang saham mempunyai informasi yang lebih sedikit dibandingkan manajer karena tidak mempunyai kontak langsung dengan perusahaan,

sehingga mereka tidak mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi inilah yang diistilahkan sebagai informasi asimetri.

Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak dapat memperoleh informasi yang sama (Scott, 2009). Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain. Manajer lebih banyak mengetahui informasi internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, sedangkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya hanya mengetahui sedikit informasi.

Sebelum lebih jauh dijelaskan mengenai *information asymetry*, perlu ditekankan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik akan mengurangi resiko terjadinya ketidak sempurnaan informasi di kalangan pengguna laporan keuangan atau asimetri informasi (Copeland dan Galai, 1983).

Dalam kaitan dengan kualitas pelaporan keuangan itu sendiri, terdapat dua pandangan yang digunakan untuk melihat kualitas pelaporan keuangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan, yang dicerminkan dalam laba yang diperoleh perusahaan. Dalam pandangan ini dinyatakan laba yang memiliki kualitas tinggi dilihat dari laba yang

berkesinambungan (*sustainable*), dan dalam periode waktu yang panjang.

Dalam pandangan kedua dinyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kinerja di pasar modal yang diwujudkan dalam bentuk *return*, sehingga jika hubungan laba perusahaan dan return kuat, maka menunjukkan informasi pelaporan keuangan yang tinggi (Ayres 1994).

Penelitian Copeland dan Galai (1983) menemukan bahwa ketika kualitas informasi akuntansi mengalami peningkatan, maka informasi asimetri akan mengalami penurunan atau dengan kata lain kualitas informasi akuntansi yang disampaikan melalui pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang negatif terhadap informasi asimetri. Fanani (2009) juga menemukan hal yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Copeland dan Galai (1983) yaitu kualitas pelaporan keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap informasi asimetri.

Ma (2010) meneliti hal yang sama dengan kualitas laba sebagai proksi kualitas pelaporan keuangan dan *B-share discount* sebagai proksi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan Ma dilakukan menggunakan sample sebanyak 76 perusahaan yang terdaftar di *Chinese Stock Market*. Dalam penelitiannya Ma menemukan adanya hubungan negatif antara kualitas pelaporan keuangan dengan asimetri informasi

Teori asimetri informasi berasal dari pengusaha dalam pasar tenaga kerja yang sering memiliki informasi lebih banyak tentang status sekarang dan mendatang perusahaannya, dan

dapat menggunakan kelebihan ini sebagai basis negosiasi. Hal ini dapat dilihat sebagai suatu ketidaksempurnaan dalam bekerjanya mekanisme pasar dan bisa menyebabkan efisiensi ekonomi (Wijaya dan Bandi, 2010). Kondisi seperti ini membuat manajemen memanfaatkan ketidakselarasan informasi untuk keuntungan manajemen sendiri serta sekaligus merugikan pihak luar perusahaan seperti membiarkan informasi yang terkait dengan investor (Ujiyantho, 2010).

Scott (2009) menyatakan bahwa ada 2 jenis asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Pada kondisi ini, para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.

Hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau orang dalam perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi kepada investor sesuai dengan kepentingannya. Hal ini akan mengakibatkan investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi sehingga membuat pasar berkurang likuiditasnya. Pasar dengan likuiditas rendah, yakni kurangnya transaksi dari

investor, akan membuat pasar tersebut tidak beroperasi dengan baik.

Untuk mengatasi permasalahan *adverse selection*, manajer harus menyebarkan informasi dalam kepada pihak lain secara bersamaan dan merata, seperti yang dikemukakan oleh Lev (1989) bahwa dengan adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyebarkan informasi secara merata kepada semua pihak, maka *publik confidence* dalam pasar akan meningkat dan akan berkontribusi pada likuiditas pasar, dimana banyak investor akan bersedia untuk melakukan transaksi (berinvestasi) dalam pasar tersebut.

Sedangkan, *moral hazard* adalah jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang sama. Atau dengan kata lain kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Pihak eksternal perusahaan, tidak dimungkinkan dapat secara langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. Sebagai akibatnya, pihak manajemen dapat menggunakan informasi internal yang berkaitan dengan transaksi perusahaan untuk

kepentingannya sendiri. Karena adanya perbedaan informasi internal dan informasi yang diterima oleh investor, studi empiris oleh Easley dan O'Hara (2004) menyatakan bahwa semakin besarnya rasio informasi internal terhadap informasi eksternal, maka semakin besar pula *return* yang diharapkan oleh investor tersebut.

Ada dua cara untuk mengendalikan masalah *moral hazard*. Pertama, laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kompensasi manajer. Kedua, laba bersih dapat menggambarkan kondisi pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja perusahaan, sehingga manajer yang lalai akan mengakibatkan laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajer yang jelek, dan nilai pasar sekuritasnya menurun. Dengan pengendalian masalah *adverse selection* dan *moral hazard* dalam yang membuat kualitas laporan keuangan perusahaan menjadi tidak baik, diharapkan informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat dipakai oleh investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. Laporan keuangan sebagai sarana informasi yang ditujukan untuk mengurangi informasi asimetri antara manajemen dan pihak eksternal perusahaan, memiliki kelemahan tertentu.

Munculnya asimetri informasi ketika manajer yang dalam hal ini sebagai pembuat laporan keuangan, memiliki

informasi serta prospek perusahaan kedepannya, dibandingkan para pemangku kepentingan lain. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi para manajer untuk merubah dan memanipulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan sebagian golongan. Kondisi ini kemudian menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan menimbulkan masalah moral yang akan menimbulkan asimetri informasi karena tidak sempurnanya informasi yang didapat para pemangku kepentingan.

Hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dengan asimetri informasi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan. Teori keagenan melibatkan keberadaan asimetri informasi antara manajer sebagai *agent* dan *stakeholder* sebagai *principal*. Munculnya asimetri informasi ketika manajer yang dalam hal ini sebagai pembuat laporan keuangan, memiliki informasi serta prospek perusahaan kedepannya, dibandingkan para pemangku kepentingan lain. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi para manajer untuk merubah dan memanipulasi pelaporan keuangan untuk kepentingan sebagian golongan. Kondisi ini kemudian menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan menimbulkan masalah moral yang akan menimbulkan asimetri informasi karena tidak sempurnanya informasi yang didapat para pemangku kepentingan.

Meskipun pembuatan laporan keuangan telah diatur oleh suatu standar yang ditetapkan oleh regulator dan *standard setter*, namun perlu disadari bahwa laporan keuangan mengandung banyak asumsi, penilaian serta pilihan metode perhitungan yang dapat digunakan oleh pembuatnya. Adanya

pilihan kebijakan akuntansi dalam standar yang dapat digunakan, membuat manajemen memiliki cukup keleluasaan untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Salah satu tindakan agen tersebut disebut sebagai *earnings management*.

Dalam penelitian Christie dan Zimmerman (1994) ditemukan bahwa perusahaan yang melakukan *takeover* cenderung memilih metode depresiasi dan metoda pencatatan persediaan, yang dapat meningkatkan laba akuntansi. Berdasarkan penelitian tersebut juga disimpulkan bahwa terdapat sikap *opportunistic* manajemen dalam kasus ambil alih perusahaan, sekalipun alasan utama pemilihan metode akuntansi didasarkan pada pertimbangan efisiensi atau pertimbangan memaksimalkan nilai perusahaan.

Richardson (1998) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Lewat penelitian pada semua perusahaan yang terdaftar di NYSE periode akhir Juni selama 1988-1992, dalam hasil penelitiannya dibuktikan memang adanya hubungan yang sistematis antara magnitud asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.

Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Fleksibilitas manajemen untuk memanajemeni laba dapat di kurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Asimetri

informasi bisa di minimalisir dengan kualitas pelaporan keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Rahmawati, dkk. (2006) berpendapat bahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong manajemen bersikap oportunistik yaitu memperoleh keuntungan pribadi, dalam hal ini melakukan manipulasi laporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Sangatlah jelas dikemukakan sebelumnya, laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam

menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang, yang salah satu bentuknya adalah *earnings management*.

6.1. Apa itu *Earnings Management*?

Scott (2009) mendefinisikan *earning management* sebagai "*the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*". Atau dengan kata lain *earnings management* adalah pilihan metode akuntansi yang dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Sedangkan SEC secara formal mendefinisikan *earnings management* sebagai praktek yang mendistorsi kinerja finansial perusahaan yang sebenarnya (Davidson et.al, 2005).

Scott (2009) lebih lanjut lagi secara khusus membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua: yakni, berdasarkan pemahaman atas perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan political costs (*oportunistic Earnings Management*), dan berdasarkan perspektif *efficient contracting* (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Selanjutnya, Healy dan Wahlen (1999) mencatat bahwa *earnings management* terjadi pada saat manajer menggunakan *judgement* dalam pelaporan keuangan dan dalam mencatat transaksi untuk merubah laporan keuangan dengan maksud memanipulasi kinerja laporan keuangan yang sebenarnya ataupun untuk mempengaruhi *outcome* kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan.

Healy dan Wahlen (1999), menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgment*, misalnya *judgment* yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva tetap, tanggungjawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, kerugian piutang dan penurunan nilai aset.

Disamping itu manajer memiliki pilihan untuk metode akuntansi, seperti metode penyusutan dan metode biaya. Kedua, tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

Dari sudut pandang etika, manajemen laba diartikan sebagai tindakan dari manajemen yang mempengaruhi laba yang dilaporkan sehingga menyajikan informasi yang tidak benar mengenai perusahaan dan dalam jangka panjang

mempunyai efek yang negatif (Merchant dan Rockness, 1994). Kemudian Fischer dan Rosenzweig (1994) mengartikan manajemen laba sebagai tindakan manajer dengan sengaja meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan tanpa menghasilkan peningkatan atau penurunan yang berkaitan dengan profitabilitas jangka panjang.

6.2. Latar Belakang Timbulnya *Earnings Management*

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk mengelola pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. Untuk memahami latar belakang munculnya praktik ini, ada beberapa teori akuntansi yang perlu dibahas.

6.2.1. Teori Akuntansi Positif

Teori Akuntansi Positif berkembang seiring kebutuhan untuk menjelaskan dan memprediksi realitas praktek-praktek akuntansi yang ada di dalam masyarakat seperti yang dikatakan oleh Watts dan Zimmerman (1990] dibandingkan dengan akuntansi normatif yang lebih menjelaskan praktek-praktek akuntansi yang seharusnya (*should be*) berlaku. Dalam pemilihan kebijakan akuntansi misalnya akan membawa dampak ekonomi terhadap pemilihan kebijakan akuntansi tersebut kepada penggunaanya yang sering disebut sebagai *economic consequences*.

Teori akuntansi positif merupakan salah satu teori akuntansi yang digunakan dalam membahas *earnings management*. Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi manajemen dalam memilih metode akuntansi yang optimal dengan tujuan tertentu (Scott, 2009). Menurut teori akuntansi positif, pemilihan metode akuntansi yang digunakan perusahaan tidak harus sama dengan perusahaan lainnya. Perusahaan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari alternatif yang ada untuk meminimalkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai nilai kontrak. Adanya kebebasan untuk memilih prosedur yang ada, maka manajer akan melakukan tindakan yang dinamakan oleh teori akuntansi positif sebagai tindakan oportunistik (Scott, 2009). Jadi tindakan oportunistik adalah dimana manajer memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya atau memaksimumkan kepuasannya.

Ada 3 hipotesis yang secara umum dihubungkan dengan perilaku oportunistik manajer (Watts dan Zimmerman, 1990).

a. Bonus Plan Hypothesis

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer akan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Tujuannya untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka peroleh karena besarnya laba yang dihasilkan. Hipotesis ini berkaitan dengan skema bonus, dimana:

- Manajemen akan meminimalkan laba karena kondisi perusahaan saat itu rugi
- Manajemen berusaha memaksimalkan laba dengan menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba agar manajemen mendapatkan bonus yang maksimal.
- Manajemen akan membuat laba menjadi rata (*income smoothing*) supaya perusahaan dianggap sudah mapan dan stabil. Dalam kondisi ini, manajemen tidak lagi memaksimalkan bonus karena bonus sudah maksimal.

Berdasarkan hipotesis ini, Healy dalam Scott (2009) menyatakan bahwa manajer seringkali berperilaku seiring dengan bonus yang akan diberikan. Jika bonus yang diberikan tergantung pada laba yang akan dihasilkan, maka manajer akan menaikkan laba atau mengurangi laba yang akan dilaporkan sesuai dengan skema bonus dari pemilik. Pemilik biasanya menetapkan batas bawah laba yang paling minim agar mendapatkan bonus. Dari pola bonus ini manajer akan menaikkan labanya hingga ke atas batas minimal tadi. Tetapi jika pemilik perusahaan membuat batas atas untuk mendapatkan bonus, maka manajer akan berusaha mengurangi laba sampai batas atas tadi dan mentransfer laba saat ini ke periode yang akan datang. Hal ini dia lakukan karena jika laba melewati batas atas tersebut manajer sudah tidak mendapatkan insentif tambahan atas upayanya memperoleh laba di atas batas yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan.

b. Debt Covenant Hypothesis

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Dinyatakan pula bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap *debt covenant*, maka semakin besar kecenderungan manajer tersebut untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *technical default*. Dengan meningkatkan laba dinilai dapat mencegah atau setidaknya menunda hal tersebut.

Penelitian dalam bidang teori akuntansi positif juga menjelaskan praktek akuntansi mengenai bagaimana manajer menyikapi perjanjian hutang. Manajer dalam menyikapi adanya pelanggaran atas perjanjian hutang yang telah jatuh tempo, akan berupaya menghindarinya dengan memilih kebijakan-kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya. Fields, Lys dan Vincent (2001) mengemukakan ada dua kejadian dalam pemilihan kebijakan akuntansi, yaitu pada saat diadakannya perjanjian hutang dan pada saat jatuh temponya hutang. Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. Semakin cenderung suatu perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih prosedur

akuntansi yang dapat mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan karena hal tersebut dapat mengurangi resiko 'default'. Sweeney dalam Scott (2009) menyatakan perilaku 'memindahkan' laba tersebut dilakukan oleh perusahaan bermasalah yang terancam kebangkrutan dan ini merupakan strategi untuk bertahan hidup.

c. Political Cost Hypothesis

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk menggunakan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Tingkat laba yang tinggi dinilai akan mendapat perhatian luas dari kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya adalah munculnya intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan berbagai macam tuntutan lainnya yang dapat meningkatkan biaya politis.

6.2.2. Agency Theory

Dari sudut pandang teori akuntansi, timbulnya *earning management* atau manajemen laba dapat juga dijelaskan dengan teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan memprediksi dan menjelaskan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Dalam ilmu hukum, agen

adalah seseorang yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan orang lain. Teori keagenan menganggap bahwa perusahaan sebagai suatu nexus (*intersection*) dari hubungan keagenan dan berusaha memahami perilaku keorganisasian dengan melihat bagaimana pihak-pihak terkait dalam hubungan keagenan dalam perusahaan memaksimalkan utilitas mereka sendiri.

Salah satu hubungan keagenan utama adalah antara kelompok manajemen dan kelompok pemilik perusahaan. Manajer dipekerjakan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola kegiatan perusahaan, sehingga menciptakan hubungan keagenan. Tujuan pemilik dan manajer mungkin saja berbeda, sehingga dengan mudahnya terlihat perilaku memaksimalkan utilitas manajer dapat berlawanan dengan kepentingan pemilik. *Owners* berkepentingan untuk memaksimalkan *return investment* dan harga sekuritas, sedangkan manajer memiliki kebutuhan ekonomi dan psikologis yang lebih luas, termasuk memaksimalkan total kompensasi mereka, yang terpenuhi lewat kontrak kerja. Karena konflik potensial ini, *owners* dimotivasi untuk mengadakan kontrak dengan manajer dengan cara yang dapat meminimalkan konflik tujuan antara kedua kelompok. Biaya-biaya dibebankan dalam mengawasi kontrak agensi dengan manajemen, dan biaya-biaya ini mengurangi kompensasi manajer, sehingga manajer memiliki insentif untuk menjaga agar biaya ini tetap rendah dengan tidak berkonflik dengan *owners*.

Teori keagenan menyajikan konflik antara *owners* dan *managers* yang dimitigasi sebagian oleh pelaporan keuangan, yang merupakan salah satu cara owner dapat mengawasi kontrak kerja dengan manajer mereka. Akuntan mereferensikan tipe tradisional pelaporan ini sebagai *stewardship*, atau akuntabilitas kepada pemilik perusahaan. Meminimalkan biaya *monitoring agency* menjadi insentif bagi manajer untuk melaporkan hasil secara *reliable* kepada pemilik, karena manajer diberi penghargaan dan dinilai sedikitnya dengan seberapa baiknya laporan mereka. Laporan yang baik juga meningkatkan reputasi manajer, yang dapat meningkatkan kompensasi mereka.

Scott (2009) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Tetapi di satu sisi, agent memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibanding dengan *principal* di sisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk memaksimalkan *utility*-nya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen

perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor.

Konsep *agency theory* menggambarkan hubungan kontrak antara *agent* dan *principal*, dimana *agent* berkewajiban untuk melakukan tugas bagi kepentingan *principal*. Dalam hubungan keagenan, masing-masing pihak terdorong motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Dan apabila setiap pihak berusaha mencapai dan atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki, maka dalam hubungan ini dapat saja terjadi konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan selaku *principal*. Dalam hal ini agent termotivasi untuk memaksimalkan fee kontraktual yang diterimanya dan *principal* berusaha untuk memaksimalkan *return* atas penggunaan sumber daya.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa jika agent dan *principal* tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya, Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan beberapa bentuk biaya keagenan, yang terdiri dari:

- 1) Biaya pemantauan (*the monitoring expenditure by the principal*).

Biaya pengawasan yang harus dikeluarkan oleh pemilik. Biaya ini dikeluarkan untuk memantau manajer dengan cara mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer.

2) Biaya penjaminan (*the bonding cost*)

Biaya yang harus dikeluarkan akibat pemantauan yang harus dikeluarkan prinsipal kepada agen. Biaya ini muncul untuk menjamin manajer agar mengambil keputusan yang tidak merugikan dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

3) Kerugian residu (*the residual loss*)

Biaya ini adalah kerugian yang ditanggung meskipun pemantauan (*monitoring*) dan penjaminan (*bonding*) telah dilaksanakan.

Masalah keagenan sebenarnya muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen ini adalah melalui mekanisme pelaporan keuangan. *Signalling theory* mengemukakan bahwa *agent* selaku perwakilan *principal*, seharusnya menyampaikan signal-signal keberhasilan atau kegagalan yang telah dicapai kepada *principal*. Penyampaian laporan keuangan oleh pihak manajemen telah berbuat sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Namun pada kenyataannya, timbul asimetri informasi dari pihak manajemen yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*),
3. manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Sesuai dengan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan, yang salah satunya adalah melakukan perbaikan profil laba.

6.3. Pola dan Motivasi dalam *Earnings Management*

Pola yang dipilih manajemen dalam melakukan *earnings management* beraneka ragam, tergantung pada tujuan mereka melakukan manajemen laba. Menurut Scott (2009), berbagai pola yang dilakukan dalam praktik *earnings management* ini adalah:

a. *Taking a bath (Big Bath)*

Pola ini terjadi pada saat perusahaan melaporkan rugi yang besar sekaligus jika perusahaan mengalami kerugian sehingga dapat menciptakan peluang laba yang besar di masa mendatang. Pola ini dapat terjadi selama ada tekanan organisasional pada saat pergantian manajemen baru yaitu dengan mengakui adanya kegagalan atau defisit dikarenakan manajemen lama dan manajemen baru ingin menghindari

kegagalan tersebut. Teknik ini juga dapat mengakui adanya biaya-biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan yang tidak bisa dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan 'pembersihan diri' dengan membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang dan melakukan '*clear the decks*'. Akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya. Pola ini dapat dijelaskan dengan bonus *plan hypothesis*, dimana manajemen akan meminimalkan laba karena konsisi perusahaan saat itu rugi.

b. *Income Minimization*

Cara ini mirip dengan '*taking bath*' tetapi kurang ekstrem. Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan (aspek *political-cost*). Kebijakan yang diambil dapat berupa *write-off* atas barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, metode *successfull-efforts* untuk perusahaan minyak bumi dan sebagainya. Penghapusan tersebut dilakukan bila dengan teknik yang lain masih menunjukkan hasil operasi yang kelihatan masih menarik minat pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari penghapusan ini adalah untuk mencapai suatu tingkat *return on assets* yang dikehendaki. Contoh penerapan pola ini adalah pada saat perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari *political cost*.

c. *Income Maximization*

Maksimalisasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, dimana laba yang dilaporkan tetap dibawah batas atas yang ditetapkan. Pemaksimalan laba dilakukan dengan memilih metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Pola ini dicontohkan dengan manajemen laba yang dilakukan perusahaan saat dekat dengan posisi pelanggaran perjanjian hutang (*debt covenant*).

d. *Income Smoothing*

Income smoothing merupakan pola manajemen laba dengan perataan laba. Pola ini merupakan cara yang paling populer dan sering dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukannya untuk mengurangi volatilitas laba bersih. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tingkat laba yang stabil. Dalam hal ini laba akan diturunkan jika terjadi peningkatan yang tajam dan menaikkan laba jika tingkat laba berada di bawah tingkat laba yang ditentukan. Tingkat laba yang stabil membuat *shareholders* dan kreditor lebih memiliki kepercayaan terhadap manajer. Perusahaan mungkin juga meratakan laba bersihnya untuk pelaporan eksternal dengan maksud sebagai penyampaian informasi internal perusahaan kepada pasar dalam meramalkan pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan.

Beberapa studi empiris di bidang *earnings management* menyatakan, ada beberapa motif yang menyebabkan timbulnya

praktek *earnings management* (Healy and Wahlen, 1999), yakni:

1. *capital market motivation*
2. *contracting motivation* dan
3. *regulatory motivations*

Berdasarkan *capital market motivation*, studi empiris menyimpulkan bahwa perusahaan biasanya melakukan praktek *income-increasing* (menaikkan laba) *earning management* pada IPO (*Intial Public Offering*) atau penawaran saham perdana perusahaan (Teoh, Welch and Wong, 1998). Sehubungan dengan *contracting motivation*, semakin dekat perusahaan pada pelanggaran *lending covenant*, maka semakin besar kecenderungan manajer perusahaan tersebut untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba (Sweeney, 1994; Guidry, Leonne, and Rock, 1999). Sesuai dengan *regulatory motivation*, hasil penelitian Jones (1991) memperlihatkan bahwa perusahaan yang ingin mendapatkan pembebasan bea impor akan menunda laba pada saat periode aplikasi ke periode berikutnya.

Sedangkan menurut Setiawati dan Na'im (2000) terkait dengan teknik dan pola manajemen laba, manajemen laba dapat dilakukan oleh manajemen melalui tiga teknik:

- 1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi

aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2) Mengubah metoda akuntansi

Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi. Sebagai contoh adalah dengan merubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.

3) Menggeser perioda biaya atau pendapatan.

Contoh rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada perioda akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Scott (2009) juga mengemukakan beberapa motivasi terjadinya *earnings management*:

1). *Bonus Purposes*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.

2). *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3). *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metoda akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

4) Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

5) *Initial Public Offering* (IPO)

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

6.4. Implikasi *Earnings Management*

Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa *earnings* atau laba telah dijadikan sebagai suatu target dalam proses penilaian prestasi usaha suatu departemen secara khusus (manajer) atau perusahaan (organisasi) secara umum (Gumanti, 2000). Laba dan tingkat keuntungan juga merupakan alat untuk mengurangi biaya keagenan (*agency costs*), dari sisi teori keagenan. Misalnya, pada saat keuntungan dijadikan sebagai patokan dalam pemberian bonus, hal ini akan menciptakan dorongan kepada manajer untuk memanipulasi data keuangan agar dapat

menerima bonus seperti yang diinginkannya. Selain itu, mengingat akan pentingnya keuntungan atau perolehan secara akuntansi (*accounting income*) untuk pembuatan keputusan oleh banyak pihak, misalnya investor.

Sesuai dengan *agency theory*, ketidakselarasan perilaku atau tujuanantara pemilik dan manajer perusahaan menimbulkan *agency cost* dalam hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan didalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh sebab itu, dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan, tidak hanya prinsipal tetapi juga agen. Dalam kaitan dengan *earnings management*, earnings management akan berdampak bagi setiap pemangku kepentingan dalam perusahaan tersebut. Praktik manajemen laba menimbulkan implikasi kepada semua pihak baik pembuat maupun pengguna informasi keuangan.

Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa manajer perusahaan sebagai agen harus menanggung akibat dari manajemen laba, yaitu berupa kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan di masa depan. Investor, sebagai prinsipal harus menanggung implikasi berupa hilangnya kesempatan memperoleh return dan kehilangan modal yang telah ditanamkannya. Pemerintah harus menanggung implikasi berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pajak. Regulator harus menanggung implikasi berupa hilangnya integritas dan kredibilitas karena regulasinya mudah dipermainkan. Sedangkan kreditur harus menanggung implikasi

berupa kehilangan kesempatan memperoleh *return* dan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan bersangkutan. Masyarakat harus menanggung implikasi berupa hancurnya perekonomian.

6.5. Bukti Empiris mengenai *Earnings Management*

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa praktek manajemen laba ternyata tidak selamanya terbukti. Dengan kata lain manajemen laba terbukti di suatu aktivitas ekonomi tetapi tidak di kasus yang lain. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, penelitian dengan kasus yang sama, terdapat temuan yang bertentangan. Beberapa penelitian mengenai *earnings management* akan dipaparkan berikut ini.

Healy (1985) barangkali adalah orang pertama yang mencoba untuk mengungkapkan kemungkinan munculnya manajemen laba, khususnya keterkaitan antara manajemen laba dan pola bonus (*bonus schemes*) dalam proses pelaporan data keuangan. Healy beranggapan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan dalam upaya untuk memaksimalkan imbalan bonus. Healy menemukan bukti bahwa ada hubungan yang kuat antara akrual dan dorongan-dorongan tertentu yang mempengaruhi manajer untuk mengatur jumlah pendapatan yang dilaporkan, khususnya manajer akan memilih akrual yang menurunkan pendapatan pada saat pola bonus berada di bawah atau di atas batasan yang diikat, dan memilih akrual

yang menaikkan pendapatan pada saat batasan tersebut tidak diikat. Secara umum Healy (1985) menemukan bukti akan munculnya manajemen laba.

Beberapa penelitian lain yang mencoba mengulang penelitian Healy (1985) diantaranya adalah Holthausen et. al (1995) dan Gaver et. al (1995). Kedua penelitian ini berbeda dengan penelitian Healy dalam hal metode pengukuran akrual total. Perbedaan lainnya adalah dalam hal jumlah sample dan periode waktu yang diteliti. Bila Healy (1985) menemukan manajer memilih pelaporan pendapatan yang menurun pada saat keuntungan jatuh di bawah yang disyaratkan, Gaver, dkk. (1995) menemukan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang menaikkan keuntungan pada saat keuntungan berada pada yang disyaratkan, dan sebaliknya. Sementara itu, Holthausen, dkk. (1995) tidak menemukan bukti bahwa manajer memanipulasi keuntungan (menurunkan keuntungan) pada saat keuntungan berada di bawah syarat minimum untuk bisa menerima bonus. Secara keseluruhan baik Gaver et. Al (1995) maupun Holthausen et. Al (1995) membuktikan akan munculnya manajemen laba di sampel yang mereka teliti.

DeAngelo (1986) tidak menemukan bukti bahwa manajer mengatur data keuangan dengan melaporkan keuntungan lebih rendah dari yang diperkirakan (*expected earnings*) pada saat perusahaan yang mereka pimpin merencanakan membeli semua sahamnya yang ada di masyarakat (*management buyout of public stockholders*). Tidak seperti DeAngelo (1986) yang tidak menemukan bukti rekayasa

earnings, Perry dan Williams (1994) menemukan bukti bahwa pada saat perusahaan merencanakan untuk membeli seluruh sahamnya yang beredar di masyarakat, manajer menurunkan keuntungan yang dilaporkan. Temuan ini tentu saja bertentangan dengan yang dilaporkan oleh DeAngelo (1986).

Sebagai catatan, Perry dan Williams (1994) menggunakan model pendeteksian akrual yang berbeda dengan yang digunakan oleh DeAngelo (1986). Pada saat mereka menerapkan metodenya DeAngelo untuk menguji kemungkinan manajemen laba, Perry dan Williams menyatakan bahwa perbedaan hasil antara penelitian mereka dan penelitian DeAngelo disebabkan oleh karakteristik sampelnya, bukan metode yang digunakan. Dalam penelitiannya yang lain, DeAngelo (1988) menemukan bahwa manajemen laba muncul pada saat manajer sedang menghadapi proxy contest di mana manajer berusaha menunjukkan prestasi yang menguntungkan (membaik).

Sama halnya dengan DeAngelo (1986), Liberty dan Zimmerman (1986) tidak menemukan bukti bahwa manajemen laba muncul pada saat manajer atau perusahaan sedang menghadapi perundingan dengan organisasi buruhnya. Liberty dan Zimmerman beranggapan bahwa manajer akan menurunkan keuntungan perusahaan selama periode perundingan dengan alasan keuntungan akan menjadi sasaran organisasi buruh untuk menuntut perbaikan hak. Mereka tidak menemukan indikasi bahwa manajer menurunkan keuntungan pada saat terjadinya perundingan.

Penelitian-penelitian yang lain secara keseluruhan membuktikan akan munculnya manajemen laba. Misalnya, manajemen laba ditemukan dalam konteks kebijakan tentang piutang ragu-ragu atau bad debts (McNichols dan Wilson, 1988), pada saat perusahaan menghadapi penyelidikan pembebasan impor (Jones, 1991), pada saat perusahaan berada dalam penyelidikan anti-perserikatan atau antitrust investigation (Cahan, 1992), pada saat pergantian pimpinan puncak perusahaan atau top executive changes (Pourciau, 1993), dan pada saat perusahaan merencanakan untuk pertama kali menjual sahamnya ke masyarakat atau initial public offering (Friedlan, 1994).

Tidak seperti Friedlan (1994), Aharony, et. Al. (1993) dalam upaya untuk menyelidiki kemungkinan munculnya manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang melakukan *initial public offering*, tidak menemukan bukti yang kuat bahwa pemilik perusahaan menaikkan keuntungan yang dilaporkan. Aharony et. Al. (1993) menemukan bukti tambahan yang menyebutkan bahwa praktek manajemen laba cenderung muncul pada perusahaan yang lebih kecil dan mempunyai *debt/equity ratio* tinggi.

Selain penelitian-penelitian tersebut di atas, ada juga penelitian yang menemukan bukti bahwa manajer melakukan praktek manajemen laba sebagai upaya untuk menghindari penurunan laba dan juga menghindari kerugian (Burgstahler dan Dichev, 1997). Praktek manajemen laba juga terbukti ditemukan pada situasi dimana perusahaan melakukan

penawaran terbatas atau *right issue* (Rangan, 1998). Dengan menggunakan pendekatan *discretionary accruals*, Rangan (1998) menemukan bukti bahwa *discretionary accruals* secara signifikan muncul pada kuartal dimana penawaran terbatas dilakukan dan di kuartal berikutnya. Bukti yang tidak jauh berbeda dengan temuan Rangan (1998) ditunjukkan dalam penelitian Teoh, Welch, dan Wong (1998).

Berdasarkan pada bukti-bukti di atas jelas sekali bahwa praktek manajemen laba tidak selamanya muncul. Dengan kata lain manajemen laba muncul di satu aktivitas ekonomi tertentu, tetapi tidak di aktivitas yang lain. Hal ini mungkin sejalan dengan pendapat Schipper (1989) bahwa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu bisa mempengaruhi keputusan manajer untuk mengatur atau mengelola, entah itu dengan menaikkan ataupun menurunkan, keuntungan yang dilaporkan. Kiranya jelas bahwa manajer merekayasa keuntungan karena adanya motivasi-motivasi tertentu, yang tidak hanya melulu didorong oleh manfaat pribadi tetapi bisa juga untuk keperluan perusahaan.

Terlepas dari terbukti atau tidaknya praktik *earnings management* oleh manajer, dampak yang ditimbulkan sungguh signifikan. Tindakan *earnings management* telah memunculkan dalam beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, dkk. 2006). Dalam kasus Enron misalnya, satu dampak yang sangat jelas yaitu kerugian yang ditanggung para investor dari

ambrohnya nilai saham yang sangat dramatis dari harga per saham US\$ 30 menjadi hanya US\$ 10 dalam waktu dua minggu.

BAB VII

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN

7.1. Prinsip *Good Corporate Governance* dan Kualitas Laporan Keuangan

Earning management merupakan fenomena yang sukar dihindari karena fenomena ini hanya dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual disepakati sebagai dasar penyusunan laporan keuangan karena dasar akrual memang lebih rasional dan adil dibandingkan dasar kas. Sebagai contoh, dengan dasar kas, pembelian aktiva tetap secara tunai senilai seratus juta rupiah mesti dibebankan sebagai biaya pada periode saat pembelian aktiva tersebut, meskipun aktiva tersebut akan bermanfaat bagi perusahaan selama 10 tahun. Jika laporan rugi laba disusun dengan dasar kas, maka besar kemungkinan dalam periode tersebut perusahaan dinyatakan mengalami rugi. Jadi pada dasarnya, basis akrual dipilih dengan tujuan untuk menjadikan laporan keuangan lebih informatif yaitu laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sayangnya, akrual yang ditujukan untuk menjadikan laporan yang sesuai

fakta ini sedikit dapat digerakkan (*tuned*) sehingga dapat mengubah angka laba yang dihasilkan.

Dengan melihat beberapa contoh kasus skandal pelaporan akuntansi akibat adanya praktik *earnings management* yang terjadi pada perusahaan raksasa dunia, sangat relevan bila ditarik suatu benang merah dari kaca mata *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan stakeholders lainnya (OECD,2004). *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Watts (2003), menyatakan bahwa salah satu cara yang di gunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku *opportunistic* manajemen adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan sebagai suatu alat yang bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban perusahaan modern. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah keagenan.

Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemegang saham. *Corporate governance* diperlukan untuk

mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Kepentingan utama pemilik dana adalah *return* yang memadai atas dana yang ditanamkan. Pengelola akan mengutamakan kepentingan pemilik apabila aktivitas yang dilakukan dan keputusan yang diambil ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, hal ini berarti juga akan meningkatkan kekayaan pemilik.

Ada beberapa prinsip *good corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya *good corporate governance* yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

Asas transparansi dalam *good corporate governance* bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Prinsip transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi

lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, pihak eksternal perusahaan harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan penerapan prinsip ini, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

Prinsip akuntabilitas merupakan asas *good corporate governance* yang mengharuskan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Adanya kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan akan menciptakan suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- Praktek Audit Internal yang Efektif, serta

- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Prinsip akuntabilitas yang diwujudkan melalui pengawasan yang efektif oleh komite audit adalah sebagai upaya melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut (Arifin, 2005).

Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

Selanjutnya, asas *responsibility* mengandung makna bahwa adanya pertanggungjawaban perusahaan. Prinsip ini berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya (Arifin, 2005).

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

Kemudian, prinsip independensi mengandung makna bahwa pengelolaan perusahaan haruslah independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Penerapan asas independensi berarti perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Dengan adanya independensi berarti bahwa laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan merupakan informasi yang akurat dan bebas dari kepentingan manapun. Sehingga manajemen tidak akan dengan seenaknya melakukan praktik earnings manajemen untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan para pemakainya.

Prinsip *good corporate governance* yang terakhir, yakni kesetaraan dan kewajaran, bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas - dari berbagai bentuk kecurangan.

Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktek korporasi yang merugikan seperti disebutkan di atas. Pendek kata, *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, prinsip *fairness* ini berarti laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material, disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia (dalam hal ini adalah Standar Akuntansi Keuangan). Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan.

Jelaslah bahwa kegunaan informasi akuntansi dalam laporan keuangan akan dipengaruhi oleh adanya kewajaran penyajian. Kewajaran penyajian dapat dipenuhi jika data yang ada didukung oleh adanya bukti-bukti yang syah dan benar serta penyajiannya tidak ditujukan hanya untuk sekelompok orang-orang tertentu (Arifin, 2005).

Lebih jauh lagi, prinsip *fairness* dalam pelaporan keuangan berarti bahwa informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan tersebut adalah bukan hasil manipulasi manajemen. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut bebas dari praktik *earnings management*. Juga, prinsip *fairness* mengandung arti bahwa stakeholders perusahaan berhak menerima informasi yang sama dengan yang dimiliki oleh manajemen, sehingga tidak ada lagi asimetri informasi antara manajemen dan *stakeholders*.

Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* ini kualitas laporan keuangan akan meningkat menjadi lebih baik lagi, yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Penyajian informasi akuntansi yang berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

7.2. Bukti Empiris Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan melalui Penerapan Prinsip *Good Corporate Governace*

Chtorou, dkk. (2001) yang dalam penelitiannya yang menguji apakah praktik *corporate governance* mempunyai pengaruh

yang positif terhadap kualitas informasi keuangan yang dipublikasikan menyimpulkan bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* akan menjadi *constrain* aktivitas *earnings management*. Penelitian tersebut menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi rekayasa yang dilakukan manajemen. Dengan mengelompokkan perusahaan-perusahaan kedalam dua grup berdasarkan jumlah *discretionary accruals*, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aktivitas *earnings management* dalam perusahaan memiliki hubungan yang signifikan dengan praktik *corporate governance* dari komite audit dan *board of directors*.

Selanjutnya, Beasley (1996) dan Zainal, dkk. (2013) yang menduga adanya hubungan antara penerapan *corporate governance* dengan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan, membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten. Dalam penelitiannya, Beasley (1996) secara khusus menguji hubungan antara proporsi *outside directors* dalam dewan komisaris, sebagai proxy praktik *good corporate governance*, dan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa presentasi terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan berbanding terbalik dengan kualitas *corporate governance* yang baik (yang diukur lewat proporsi *outside directors* dalam dewan komisaris), dimana dengan semakin besarnya proporsi *outside directors*, terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan semakin kecil. Sedangkan Zainal, dkk. (2013) mengukur kekuatan penerapan

good corporate governance dengan distribusi kekuasaan antara CEO dan dewan komisaris. Mereka secara khusus menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang secara konsisten menjalankan tugas mereka sebagai mekanisme *good corporate governance* akan mengurangi kecenderungan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan.

Selanjutnya, beberapa hasil penelitian lainnya juga menyatakan bahwa mekanisme *good corporate governance* berupa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen diyakini dapat membatasi perilaku manajemen dalam melakukan *earnings management*, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan tersebut. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Sedangkan kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2005).

Melalui proses *monitoring* secara efektif, kepemilikan institusional mampu untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005). *Good corporate governance* ditunjukkan dengan hadirnya investor

institusional karena tindakan monitoring dari investor institusional dapat menyebabkan penggunaan utang menurun. Tindakan monitoring oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan. Boediono (2005) mengemukakan, persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Penelitian yang dilakukan Jamaan (2008) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan integritas laporan keuangan.

Kepemilikan saham oleh perusahaan merupakan mekanisme yang dapat digunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Adanya kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi masalah keagenan dengan manajer dan menyelaraskan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri

(Ross, 1999). Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan. Untuk memperbaiki *corporate governance* adalah dengan meyakinkan bahwa perusahaan memiliki satu atau lebih pemegang saham besar. Penelitian yang dilakukan oleh Susiana dan Herawaty (2007) dan Jamaan (2008) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajerial dengan integritas laporan keuangan.

Sejak terjadinya skandal akuntansi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di dunia, seperti Enron dan WorldCom, peran komite audit dalam menjamin kualitas laporan keuangan sangatlah penting. Peran komite audit dalam penerapan *good corporate gornance* adalah lewat pengawasan manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar suai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan *good corporate governance* dan independensi komite audit merupakan salah satu ukuran penerapan prinsip *good corporate governance* selain kompetensi dan aktivitas komite audit.

Rajgopal, dkk. (1999) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dan komisaris independen dapat mencegah praktik manajemen laba, karena keberadaan komite audit dan

komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (KNGCG, 2006).

Komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan yang mempengaruhi integritas laporan keuangan (Oktadella dan Zulaikha, 2011). Dengan demikian, sangatlah penting bagi perusahaan untuk memfokuskan pada atribut-atribut dari komite audit yang dapat meningkatkan efektivitas komite audit itu sendiri (Ayemere dan Elijah, 2015)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herawaty (2008) menetapkan *corporate governance* sebagai variabel moderasi dari pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi dapat meminimumkan manajemen laba dengan pemantuan dari

komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan institusional. Penelitian Purwandari (2011) menyatakan bahwa *good corporate governance* dengan proksi variabel komite audit, kepemilikan instusional, dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Dari hasil penelitian ini disimpulkan variabel komite audit, kepemilikan institusional dan profitabilitas dapat mengurangi tindakan manajemen laba.

Carcello dan Neal (2000) kemudian menguji proporsi *independensi komite audit*, salah satu organ yang disyaratkan dalam penerapan prinsip *good corporate governance*. Dalam penelitian ini, mereka menyimpulkan bahwa adanya hubungan positif antara komite audit dengan berkurangnya tekanan manajemen terhadap komite tersebut pada saat menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian mereka juga menyatakan bahwa lebih banyak anggota komite audit yang independen masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya, independensi komite audit diketahui mempunyai hubungan positif dengan level rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen (Klein, 2002; Westphal dan Zajac, 1997). Sejalan dengan kesimpulan tersebut, Dezoort dan Salterio (2001) juga menyimpulkan bahwa komite audit akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap rekayasa yang dilakukan manajemen. Penelitian oleh Widianingsih (2014) juga menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris, komisaris independen dan kepemimpinan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba

Selain independensi, frekuensi pertemuan dan kompetensi komite audit juga seringkali dipakai untuk mengukur penerapan *good corporate governance* yang dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan perusahaan. Abbot, dkk. (2004) menemukan bukti bahwa komite audit yang melakukan pertemuan kurang dari jumlah minimum memiliki kemungkinan lebih besar untuk menyajikan kembali labanya (*earnings restatement*).

Selain itu, dalam hasil penelitian mereka ditemukan juga bahwa kecurangan dan penyajian kembali laba semakin banyak terjadi ketika anggota komite audit tidak memiliki kompetensi di bidang keuangan. Dengan menguji kompetensi anggota komite audit, McMullen dan Randghun (1996) menyimpulkan adanya hubungan positif antara kompetensi tersebut dengan menurunnya kemungkinan dilakukannya *earnings management*. Atau dengan kata lain, semakin kompeten komite audit akan semakin mengurangi kemungkinan praktik rekayasa keuangan yang dilakukan manajemen.

Selain itu, Alzoubi dan Selamat (2012) mengasumsikan bahwa ukuran komite audit dengan anggota lebih banyak, independen, memiliki *financial expertise*, dan yang lebih aktif bertemu berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sejalan dengan penelitian penelitian sebelumnya, Badolato, dkk. (2014) juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara audit komite yang memiliki *financial expertise* dan sekaligus status yang baik (*high relative status*) dengan tingkat

manajemen laba yang rendah, yang diukur dengan *accounting irregularities* dan *abnormal accruals*.

Penelitian oleh Qi dan Tian (2011) memfokuskan pada karakteristik komite audit dan manajemen laba. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa beberapa karakteristik komite audit seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Kemudian Qi dan Tian (2012) melakukan uji robustness dengan menggunakan besaran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan dari komite audit. Hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran, independensi, dan frekuensi rapat komite audit mempengaruhi tindakan manajemen laba yang dapat berdampak terhadap kualitas dari laporan keuangan perusahaan.

Selain komite audit, dewan komisaris (*board of directors*), secara general, juga merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan laporan keuangan yang reliable. Sehingga secara teoritis keberadaan dewan ini akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen (Chourou, dkk. 2001).

Sejalan dengan hal tersebut Beasley (1996) dan Abbotts, dkk. (2000) menguji apakah besarnya dewan komisaris (*board size*) mempunyai hubungan yang positif dengan kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian tersebut tidak menemukan hubungan antara kedua hal tersebut, karena

semakin besar dewan direktur semakin tidak efisien dan semakin lemah kontrolnya terhadap manajemen. Lebih lanjut dewan komisaris yang independensi secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen (Chtourou, dkk. 2001).

Beasley (1996) juga menemukan hubungan negatif antara besarnya *non-executive members* dengan tingkat kecurangan tersebut. Sehingga secara singkat dapat dikatakan ada hubungan negatif antara proporsi independensi dewan komisaris dengan level manipulasi yang dilakukan manajemen. Demikian juga kompetensi dewan komisaris yang mempunyai hubungan negatif dengan level manipulasi tersebut. Atau dengan kata lain, semakin kompeten dewan komisaris, semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Dengan berkurangnya kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan, maka secara otomatis kualitas laporan keuangan akan meningkat.

Dari studi empiris mengenai relevansi antara kualitas laporan keuangan dan *good corporate governance*, dapatlah disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* penting karena penerapan prinsip tersebut secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dabor dan Ibadin (2013) menegaskan bahwa *corporate governance* adalah faktor kunci yang menentukan manajemen apakah akan melakukan tindakan *earnings management* atau tidak. Prinsip

good corporate governance yang diterapkan dengan konsisten dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan, dengan minimalisasi rekayasa kinerja laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

Prinsip *good corporate governance* akan memastikan bahwa pelaporan keuangan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip yang berlaku secara umum. Penerapan prinsip *good corporate governance* secara kredible diharapkan akan mengurangi praktik manajemen laba karena penerapan prinsip – prinsip ini merupakan media pengawasan manajemen yang efektif dalam proses pelaporan keuangan (Patrick, dkk. 2015).

BAB VIII

PENUTUP

Laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itulah harus dipahami bahwa laporan keuangan perusahaan lebih dari sekedar angka karena mengandung informasi yang berguna bagi para penggunanya.

Akan tetapi, kemampuan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya tidak terlepas dari permasalahan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu sendiri, yaitu reliabilitas dan relevansi. Informasi akuntansi dikatakan relevan jika mempunyai nilai prediktif dan nilai umpan balik. Selanjutnya, informasi akuntansi dapat dikatakan andal (*reliable*) jika memenuhi tiga karakteristik utama, yaitu jujur dalam penyajian, dapat diuji, dan netral.

Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang berkualitas yang memberikan manfaat bagi para pemakainya adalah informasi akuntansi yang *reliable* sekaligus relevan. Namun, simpulan dari diskusi *Reserve Recognition Accounting* (RRA) menyatakan bahwa tidak mungkin menyiapkan laporan

keuangan dengan tingkat reliabilitas dan relevansi secara penuh karena konsekuensinya akan terjadi *trade-offs* antara reliabilitas dengan relevansi.

Laporan keuangan yang biasanya disiapkan oleh perusahaan pada umumnya merupakan pengaplikasian dari *historical cost accounting* dan bukan berdasarkan *present value accounting*. Sehingga laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan tersebut kurang relevan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan lain untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu bagaimana laporan keuangan lebih berguna bagi para penggunanya, dalam hal ini investor sebagai pemakai informasi laporan keuangan untuk pengambilan keputusan investasi.

Pendekatan *decision usefulness* digunakan agar supaya penyediaan informasi akuntansi lebih bermanfaat bagi investor. Atau dengan kata lain, bagaimana informasi akuntansi dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan investasi investor (mengingat adanya *trade-off* antara relevansi dan reliabilitas dalam informasi laporan keuangan).

Dua teori keuangan, yakni *single person decision theory* dan *theory of investment*, digunakan dalam menjelaskan perilaku investor dalam menggunakan informasi akuntansi berdasarkan pendekatan *decision usefulness*. Kedua teori ini akan membantu penyediaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, karena penyiapan informasi laporan keuangan yang sesuai tidaklah mudah.

Single person decision theory merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang (investor) mengambil

keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan, *theory of investment* akan membantu pemahaman karakteristik investor yang berhubungan dengan risiko yang menjadi faktor penting bagi investor dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi akuntansi.

Kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan juga dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang terjadi karena ada pihak yang dapat memperoleh dan memanfaatkan informasi untuk kepentingannya sedangkan pihak lain tidak dapat memperoleh informasi yang sama. Ketidakseimbangan informasi ini mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Terdapat dua jenis asimetri informasi, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* terjadi pada saat ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Sedangkan *moral hazard* adalah asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang sama.

Asimetri informasi antara manajemen dan pemakai laporan keuangan memberi kesempatan dan mendorong terjadinya praktik *earnings management*. *Earnings management* merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk merubah laporan keuangan dengan maksud

memanipulasi kinerja laporan keuangan yang sebenarnya ataupun untuk mempengaruhi *outcome* kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan.

Timbulnya *earnings management* ini dijelaskan dengan 2 teori, yaitu teori akuntansi positif dan teori keagenan. Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi manajemen dalam memilih metode akuntansi yang optimal dengan tujuan tertentu. Adanya kebebasan untuk memilih prosedur yang ada, maka manajer akan melakukan tindakan yang dinamakan oleh teori akuntansi positif sebagai tindakan oportunistik memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya atau memaksimalkan kepuasannya.

Timbulnya *earning management* atau manajemen laba dapat juga dijelaskan dengan teori keagenan. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Masalah keagenan muncul ketika *principal* kesulitan untuk memastikan bahwa *agent* bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan *principal*.

Menurut teori keagenan, salah satu mekanisme yang secara luas digunakan dan diharapkan dapat menyelaraskan tujuan *principal* dan *agent* ini adalah melalui mekanisme

pelaporan keuangan. Namun pada kenyataannya, timbul asimetri informasi dari pihak manajemen yang memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat dimanipulasi sesuai dengan kepentingan manajemen. Dengan adanya asimetri informasi ini, manajemen dimungkinkan untuk melakukan *earnings management*.

Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. Dalam praktik *earnings management*, manajer cenderung melakukannya lewat pengendalian transaksi akrual, yaitu transaksi yang tidak mempengaruhi aliran kas (Friedlan, 1994).

Dengan adanya praktik *earnings management*, kualitas laporan keuangan menjadi tidak baik, sehingga informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan ini tidak bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, *earnings management* harus dihilangkan.

Salah satu cara yang digunakan mengatasi dan membatasi perilaku *opportunistic management* dalam praktik *earnings management* adalah *corporate governance*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan

pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan.

Secara empiris terbukti bahwa penerapan prinsip *good corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi *constrain* bagi aktivitas *earnings management* yang dilakukan manajemen perusahaan. *Good corporate governance* merupakan hal yang harus dijalankan oleh perusahaan. Core, dkk. (1999) menjelaskan perusahaan menghadapi masalah keagenan yang lebih tinggi saat struktur *corporate governance* lemah. Adanya *divergence of interest* antara *principal* dan *agent* mencerminkan *weak governance* yang merupakan bagian dari *agency cost* (Putri, 2012). Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri atas transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen.

Pada akhirnya, penerapan *good corporate governance* harus mampu dilakukan secara berkelanjutan. *Corporate governance* bukan hanya tentang pengelolaan perusahaan saja, ruang lingkupnya lebih luas meliputi keadilan serta administrasi yang transparan dan efisien untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan. (Bairathi, 2009). Prinsip-prinsip *good corporate governance* meliputi transparansi (*transparency*),

akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) serta kejujuran dan kesetaraan (*fairness*) berhasil menciptakan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah manajemen melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham, terlebih dalam kaitannya dengan memanipulasi laporan keuangan. Perusahaan yang menjalankan tata kelola yang baik akan menambah kepercayaan bagi para pemegang saham. Pemegang saham sebagai pemilik dapat merasa yakin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan dengan tepat dan efisien.

Good corporate governance dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba sehingga meningkatkan kinerja laporan keuangan. Karena laporan keuangan perusahaan merupakan cerminan yang menggambarkan kondisi perusahaan, maka peningkatan kualitas laporan keuangan bermakna bahwa terjadi perbaikan kinerja pada perusahaan secara holistik. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan benar-benar memberi manfaat bagi pemakai laporan tersebut.

- Abbott, L., J., S, Parker, G., F., Peters, dan Raghunandan., 2003. *The association between audit committee characteristics and audit fees*, Auditing: A Journal of Practice & Theory Vol. 22, No. 2, hal. 17-32.
- Aharony, J., Lin, C. J. and Loeb, M. P., 1993. *Initial Public Offering, Accounting Choices, and Earnings Management*, Contemporary Accounting Research, Vol. 10 No. 1, hal. 61-81.
- Anthony, A.N. and Reece, J.S., 1989, *Accounting : Text and Cases*. 8th Ed. Illinois: Richard D. Irwin.
- Alzoubi, E. S. dan Selamat, M. H., 2012. *The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms on Constraining Earning Management: literature Review and Proosed Framework*. International Journal of Global Business, Vol. 5, No.1, hal. 17-35.
- Arifin., 2005. *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*. Orasi Ilmiah pada Sidang Senat guru Besar Universitas Diponegoro dalam rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar.
- Ayemere, Ibadin L. dan Elijah, Afensimi., 2015. *Audit Committee Attributes and Earnings Management: Evidence from Nigeria*. International Journal of Business and Social Research, Volume 5, No. 4, hal. 14 – 23.
- Ayres, F.L., 1994. *Perception of Earnings Quality: What Managers Need to Know*. Management Accounting, Vol. 75 No. 9, hal. 27-29.

- Bachtaruddin, T., 2003. *Struktur Teori Akuntansi Keuangan*. <http://www.scribd.com/doc/12781591/Struktur-Teori-Akuntansi-Kuangan>.
- Badolatoa, Patrick G., Donelsona, Dain C. Dan Ege, Matthew., 2014. *Audit committee financial expertise and earnings management: The role of status*. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 58, No. 2–3. Hal. 208-230.
- Bairathi, V., 2009. *Corporate Governance: A Suggestive Code*. *International Research Journal*, Vol. 11, No. 6, hal. 753-754.
- Ball, R. dan Brown, P., 1968. *An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers*, *Journal of Accounting Research*, Vol. 6, No. 2, hal. 159-178.
- Beasley, M. S., 1996. *An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud*. *Accounting Review*, Vol. 71, No. 4, hal. 443-465.
- Beaver, W. H., 1968. *The Information Content of Annual Earning Announcements*, *Journal of Accounting Research*, Supplement, hal. 67-92.
- Beaver, W. and D. Morse., 1978. *What determines price-earnings ratios?* *Financial Analysts Journal*. Vol. 34, No. 4, hal. 65-76.
- Belkoui, A.R., 2001. *Teori Akuntansi*. Jilid Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Beneish, M., 2001. *"Earnings Management: a perspective"*, *Managerial Finance* Vol 27, hal. 3 –17.
- Benston, George J., 1966. *Multiple Regression Analysis of Cost Behavior*, *The Accounting Review*, Vol. 41, No. 4, hal. 657–672.
- Brigham, E. F. dan Daves, P. R., 2004. *Intermediate Financial Management*, South Western:Thompson.

- Boediono, G. SB., 2005. *“Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur”*, Simposium Nasional Akuntansi VIII.
- Brown, Ph., dan Kennelly, J.W., 1972. *The Informational Content of Quarterly Earnings: An Extension and Some Further Evidence*, *The Journal of Business*, Vol. 45, No. 3, hal. 403-415.
- Burgstahler, D., and Dichev, I., 1997. *Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Losses*, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 24, hal. 99-126.
- Cahan, S. F., 1992. *The Effects of Antitrust Investigations on Discretionary Accruals: A Refined Test of Political-Cost Hypothesis*, *The Accounting Review*, Vol. 67, No. 1, hal. 77-95.
- Carcello, J. V., dan Neal, T. L., 2000. *Audit Committee Composition and Auditor Reporting*. *Accounting Review*, Vol. 75, No. 4, hal. 453 – 467.
- Chambers, D. J., 1999. *Earnings management and Capital Market Misallocation*, Working paper, Desember.
- Chinn, Richard., 2000. *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London.
- Christensen, J. A. dan Demski, J. S., 2003. *Accounting Theory: An Information Content Perspective*. Illionis Boston: McGraw-Hill.
- Christie, Andrew A. dan Jerold L. Zimmerman., 1994. *Efficient and Opportunistic Choices of Accounting Procedures : Corporate Control Contests*, *The Accounting Review*, Vol. 69, No. 4, hal. 539 – 556.
- Chtourou, S., Be´dard, J., Courteau, L., 2001. *Corporate governance and earnings management*, Working paper, Universite´ Laval, Canada.
- Core, J., R. Holthausen, and D. Larcker., 1999. *Corporate governance, chief executive officer compensation,*

- and firm performance*, Journal of Financial Economics Vol. 51, No. 3, hal. 371-406.
- Copeland, T. E. and Galai, D. 1983. *Information Effects on the Bid-Ask Spread*, The Journal of Finance, Vol. 38, No. 5, hal. 1457–1469.
- Cornett, M.M., A.J. Marcus, A. Saunders, and H. Tehranian., 2006. *Earnings management, corporate governance, and true financial performance*, Working paper, Boston College.
- Dabor, E.L. and Ibadin, P.O., 2013. *An Evaluation of the Implications of Earnings Management Determinants in the Banking Industry: the case of Nigeria*. African Journal of Social Sciences. Vol.3, No. 3, hal. 118-129.
- Daniri, M. A. dan A. I. Simatupang., 2009. *Rekayasa Pelaporan Keuangan: Isu Akuntansi Atau Governance?*, Forum for Corporate Governance in Indonesia, <http://www.fcgi.or.id>.
- Davidson, R., Goodwin-Stewart, J. and Kent, P., 2005. *Internal Governance Structures and Earnings Management*. Accounting and Finance, Vol. 45, No. 2, hal. 241–267.
- DeAngelo, L. E., 1986. “*Accounting Number as Valuation Substitutes: A Study of Management Buyouts of Public Stockholders*”. The Accounting Review, Vol. 59, hal. 400-420.
- _____, 1988. “*Managerial Competition, Information Costs, and Corporate Governance: The Use of Accounting Performance Measures in Proxy Contests*”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 12, hal. 3-36.
- DeZoort, F. Todd dan Salterio, Steven E., 2001. *The Effects of Corporate Governance Experience and Financial-Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee*

- Members' Judgments*, AUDITING: A Journal of Practice & Theory, Vol. 20, No. 2, hal. 31-47.
- Easley, D. dan M. O'Hara., 2004. *Information and the Cost of Capital*, *The Journal of Finance*, August, hal. 1553 – 1583.
- Easton, P.D., dan M.E. Zmijewski., 1989. *Cross-Sectional Variation in Stock Market Response to Accounting Earnings Announcements*, *Journal of Accounting and Economics*, July, hal. 117-141.
- Eisenhardt, K. M., 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*, *Academy of management Review*, Vol. 14, hal. 57-74.
- Evans, J., R. Evans dan S. Loh., 2002. *Corporate Governance and Declining Firm Performance*. *International Journal of Business Studies* (June), hal. 1-18.
- Fama, E. F., 1980. *Agency Problems and the Theory of the Firm*. *The Journal of Political Economy*, Vol. 88, No. 2, hal. 288-307.
- Fanani, Zaenal., 2009. *Kualitas Pelaporan Keuangan: Berbagai Faktor Penentu dan Konsekuensi Ekonomis*. *Jurnal: Universitas Airlangga*.
- Fields, T. D., Lys, T. Z., dan Vincent, L., 2001. *Empirical research on accounting choice*. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 31, No. 1-3, hal. 255-307.
- Financial Accounting Standards Board., 1980. *Statement of Financial Accounting Concept*, No. 1 : Objective of Financial Statement, <http://accounting.uwaterloo.ca>.
- Financial Accounting Standards Board., 1980. *Statement of Financial Accounting Concept*, No. 2 : Qualitative Characteristics of Accounting Information, <http://www.fasb.org>.
- Financial Accounting Standards Board., 1980. *Relevance and Reliability*, <http://www.fasb.org>.

- Fischer, M., and Rosenzweig, K., 1994. *Is Managing Earnings Ethically Acceptable? Attitudes of Accounting Practitioners*, Management Accounting, March, hal. 31-34.
- Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., dan Schipper, K. 2004. *Costs of Equity and Earnings Attributes*. Accounting Review, Vol. 79, No. 4, hal. 967-1010.
- Friedlan, M. L., 1994. *Accounting Choices of Issuers of Initial Public Offerings*, Contemporary Accounting Research, Vol. 11, No. 1, hal 1-31.
- Gaver, J. J., Gaver, K. M., and Austin, J. R., 1995. *Additional Evidence on Bonus Plan and Income Management*, Journal of Accounting and Economics, Vol. 19, hal. 3-28.
- Guidry, F., A. Leone, and S. Rock., 1999. *Earnings-based bonus plans and earnings management by business unit managers*, Journal of Accounting and Economics, Vol. 26, hal. 113-142.
- Gumanti, Tatang Ari., 2000. *Earnings Management dalam Penawaran Saham Perdana di BEJ*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 4, No. 2, Mei 2001.
- Gupta, M. dan P. Fields., 2009. *Board Independence and Corporate Governance: Evidence From Director Resignations*, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 36, No.2, hal. 161 – 184.
- Hanafi, Mamduh M. dan Halim, A., 2003. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Hansen, D. R. dan Mowen M. M., 2005. *Management Accounting*, Seventh Edition. Thomson South-Western.
- Haris, W., 2004 *Pengaruh Earnings Management Terhadap Kinerja Di Seputar SEO*. Tesis S2. Magister Sains Akuntansi UNDIP. Tidak dipublikasikan

- Haryono, S., 2014. *Apa itu Good Corporate Governance?* <http://www.profsis90.wordpress.com>, November.
- Healy, P. M. and J. M. Wahlen., 1999. *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*, *Accounting Horizons*, Vol. 13, No. 4, hal. 365-383.
- Healy, P. M., 1985. *The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions*, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 10, hal. 85-107.
- Herawaty, Vinola., 2008. *Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2, hal. 97-108.
- Holthausen, R. W., Larke, K. M., and Sloan, R. G., 1995. *Annual Bonus Schemes and the Manipulation of Earnings*, *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 12, hal. 29-74.
- Iatridis, G. 2011, "Accounting Disclosures, Accounting Quality and Conditional and Unconditional Conservatism", *International Review of Financial Analysis*, Vol. 20, No. 2, hal. 88-102.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)., 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jamaan., 2008. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan: Studi Kasus Perusahaan Publik yang Listing di BEJ". Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jensen, M. C., 1993. *The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems*. *Journal of Finance*, Vol. 48, No. 3, hal. 831-880.

- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H., 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics Vol. 3, hal. 305-360.
- Jones, J. J., 1991, Earnings Management During Import Relief Investigations, Journal of Accounting Research, Autumn, Vol. 29, No. 2, hal. 193-228.
- Kaihatu, T. S., 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1, hal. 1-9.
- Kamyarta Ariwangsa., 2007. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Hutang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Kieso, E. D., dan Weygandt J. J., 1995. *Akuntansi Intermediate*. Jilid Satu, Edisi Ketujuh, Binarupa Aksara.
- Klein, A., 2002. *Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management*, Journal of Accounting and Economic, Vol. 32, hal. 375-400.
- Komite Cadbury., 1992. *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*, Gee, London.
- Komite Nasional Kebijakan Governance., 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*, <http://www.governance-indonesia.com>.
- Lev, B., 1989. *On The Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research*, Journal of Accounting Research, Vol. 27, No. 2, hal. 153-192.
- Liberty. S. E., dan Zimmerman, J. L., 1986. *Labor union contract negotiations and accounting choices*. The Accounting Review, Vol. 61, No. 4, hal. 692-712.
- Ma, Tao., 2010. *Financial Reporting Quality and Information Asymmetry: Evidence from the Chinese Stock Market*, Moore School of Business University of

- South Carolina,
http://sa.shufe.edu.cn/upload/_info/2002000049/101325_1205170853222.pdf.
- McKnight, Philip J., dan Weir, Charlie., 2009. *Agency Costs, Corporate Governance Mechanisms and Ownership Structure In Large UK Publicly Quoted Companies: A Panel Data Analysis*. The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 49, hal. 139–158.
- McMullen, D. A., dan Raghunandan, K., 1996. *Enhancing Audit Committee Effectiveness*. Journal of Accountancy, Vol. 182, No. 2, hal. 79-81.
- McNichols, M., and Wilson, G. P., 1988. *Evidence of Earnings Management from the Provision for Bad Debts*, Journal of Accounting Research, Vol. 26, hal. 1-31.
- Merchant, K. A., dan J. Rockness., 1994. *The Ethics of Managing Earnings: An Empirical Investigation*, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 13, hal. 79-94.
- Miller, D., and Breton, L. Isabelle., 2006. *Family Governavce and Firm performance: Agency, Stewardship, and Capabilities Family Businesses Review*, Vol. 19, No. 1, hal. 73-87.
- OECD., 2004. *Experinces From the Corporate Governance Roundtables*, <http://www.oecd.org/dataoecd/19/26/23742340.pdf> -523k-View aws html>, Mei.
- Oktadella, D., dan Zulaikha., 2011. *“Analisis Corporate governance terhadap Integritas Laporan Keuangan”*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.
- Patrick, Egbunike A., Paulinus, Ezelibe C., dan Nympha, Aroh N., 2015. *The Influence of Corporate Governance on Earnings Management Practices: A Study of Some Selected Quoted Companies in Nigeria*. American

- Journal of Economics, Finance and Management Vol. 1, No. 5, hal. 482-493.
- Penmann, SH., 1988. *"An Empirical Investigation of the Voluntary Disclosure of Corporate Earning Forecasts"*. Journal of Accounting Research. Vol. 18, hal. 132-160.
- Perry, S, E., and Williams, T, H., 1994. *Earnings Management Preceding Management Buyout Offers*, Journal of Accounting and Economics, Vol. 18, hal. 157-159.
- Pourciau, A., 1993. *Earnings Management and Nonroutine Executives Changes*, Journal of Accounting Economics, Vol. 16, No. 3, hal. 317-336.
- Purwandari., 2011. *Analisis pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage terhadap Praktek Manajemen Laba (Earning Management)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Putri, Asri Dwija., 2012. *Peranan Good Corporate Governance dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi*, AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Vol. 7, No. 1, hal. 193-204.
- Qi, B. dan G. Tian., 2012. *The Impact of Audit Committees' Personal Characteristics on Earning Management: Evidence From China*. The Journal of Applied Business Research, Vol. 28, No. 6.
- Rahmawati, Suparno, Y., dan Qomariyah, N., 2006. *Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*, Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Rangan, S., 1998. *"Earnings Management and the Performance of Seasoned Equity Offerings"*. Journal of Financial Economics, Vol. 50, hal. 101-122.
- Rajgopal, S., V. Mohan and J. J. Jiambalvo., 1999. *Is Institutional Ownership Associated with Earnings Management*

and the Extent to which Stock Prices Reflect Future Earnings? Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=163433>.

- Rezaee, Z., 2004. *Corporate Governance Role in Financial Reporting*. Research in Accounting Regulation, Vol. 17, hal. 107-149.
- Richardson, V. J., 1998. *Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence*", Working paper, Maret.
- Ross, Stephen., 1999. *Some Notes on Compensation, Agency Theory, and the Duality of Risk Aversion and Riskiness*, MIT working paper.
- Schipper, K., 1989. "Commentary on Earnings Management". Accounting Horizon, Vol. 3, hal. 91-102.
- Schipper, K. and L. Vincent., 2003. *Earnings Quality*. Accounting Horizons, Vol.17. Supplement, hal. 97-110.
- Schleifer, Andrei, and Robert W. Vishny., 1997. *A Survey of Corporate Governance*, Journal of Finance, Vol. 52, hal. 737-83.
- Scott, W. R., 2009. *Financial Accounting Theory*. 5th Edition. Toronto Canada: Prentice Hall.
- Setiawati, Lilis dan Ainun Na'im., 2000. *Manajemen Laba*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 4, hal. 424-441.
- Shaw, John. C., 2003. *Corporate Governance and Risk: A System Approach*, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey.
- Siregar, S. V. dan S. Utama., 2006. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management)*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 9, No. 3, hal. 307-326.
- Sulistyanto, H. S., 2008. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Sulistiyanto, H. S. dan H. Wibisono., 2008. *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia*. <http://researchengines.com/hsulistiyanto3.html>.
- Susiana dan Arleen Herawaty., 2007. *Analisa Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar. 26-28 Juli.
- Sweeney, A., 1994. *Debt-covenant Violations and Managers' Accounting Responses*, Journal of Accounting and Economics, hal. 281-308.
- Syed, Z., dan Safdar A. 2009. *The Impact of Corporate Governance on the Cost of Equity: Empirical Evidence from Pakistani Listed Companies*. The Lahore Journal of Economics, Vol. 14, hal. 139-171.
- Tandelilin, E., 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo., 2003. *Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia*. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI).
- Teoh, S. H., I. Welch and T. J. Wong., 1998. *Earning Management and the Long-term Market Performance of Initial Public Offerings*, Journal of finance, Vol. 53, hal. 1935-1974.
- Ujiyantho, Arief. 2010. *Asimetri Informasi dan Manajemen Laba: Suatu Tinjauan dalam Hubungan Keagenan*. Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Walsh, J. P., dan Seward, J. K., 1990. *On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms*. Academy of Management Review, Vol. 15, No. 3, hal. 421-458.

- Watts, R. L., and Zimmerman, J. L., 1990. *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*, The Accounting Review, Vol. 60, No. 1, hal. 131-156.
- Watts, Ross L., 2003. *Conservatism in Accounting Part I: Explanations and Implications*. Accounting Horizon, Vol. 17, hal. 207-221.
- Westphal, J. D., dan Zajac, E. J., 1997. *Defections from the Inner Circle: Social Exchange, Reciprocity, and the Diffusion of Board Independence in U.S. Corporations*. Administrative Science Quarterly, Vol. 42, No. 1, hal. 161–183.
- Widianingsih, Yuni Pristiwati N., 2014. *Penerapan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Go-Public*. Seminar Nasional for Call Papers UNIBA, Vol. 1, No. 1, hal. 234 – 242.
- Wijaya, Lihan Rini Puspo dan Bandi, Anas Wibawa., 2010. *Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., dan Tearney, M. G., 2004. *Accounting Theory Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*, 6th edition, Thomson South-Western.
- Zainal, A., Rahmadana, M. F., dan Zain, Khairuddin Naim Bin Mohd., 2013. *Power and Likelihood of Financial Statement Fraud: Evidence from Indonesia*, Journal of Advanced Management Science, Vol. 1, No. 4, hal. 410– 415.



Dr. Hendrik Manossoh, SE, MSi, Ak.

Lahir di Desa Naha Kabupaten Sangihe Tahun 1973, adalah staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Manado S1 dan Program Magister Akuntansi (S2). Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado pada Tahun 1999 dan *Master of Science* (MSi) dari Program Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya pada Tahun 2006. Pada Tahun 2014 telah menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini aktif dalam organisasi profesi, sebagai Bendahara IAI Wil Sulawesi Utara dan Ketua Devisi Kajian Akuntansi ISEI Cabang Manado Sulawesi Utara dan juga sebagai Redaksi Pelaksana Jurnal Riset Akuntansi *GOING CONCERN*.

Good Corporate Governance untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan menyajikan tinjauan teoritis dan empiris atas penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki informasi akuntansi yang reliable sekaligus relevan dan bebas dari tindakan oportunistik manajemen yang dikenal dengan earnings management. Penerapan kelima prinsip good corporate governance, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan merupakan kunci utama untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas yang benar-benar memberi manfaat bagi pengguna laporan tersebut.